

346.033  
WID  
p 01

PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN  
DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA  
DI INDONESIA



T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Oleh :  
IRA WIDIASTUTI, SH  
NIM : B4A 000044

Pembimbing I :  
Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH.  
Pembimbing II :  
Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
KAJIAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2003

UPT-POSTAK-UNDIP

## PENGESAHAN

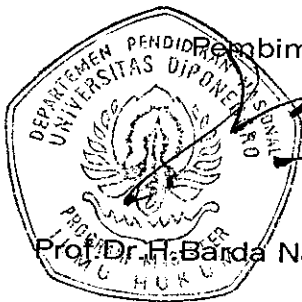
### PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA

## TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama : IRA WIDIASTUTI, SH  
NIM : B4A 000044



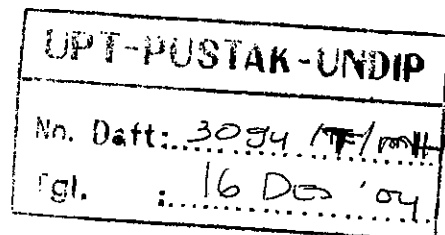
Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Barda Nawawati Arief, SH. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.MH.

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawati Arief, SH.



## PERSEMBAHAN

*Destined for :  
My Jesus Christ for Your blessing in my whole life  
and  
My beloved husband, for your willingness to stand beside me*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat-Nyalah maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Kelegaan dan kepuasan, itulah yang penulis rasakan saat terselesaikannya penulisan dan penyusunan tesis ini.

Penulisan dan penyusunan tesis dengan judul "PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KORBAN DALAM KEBIJAKAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA" ini dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata II di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Begitu banyak pengalaman dan pengetahuan berharga yang penulis dapatkan selama penulisan dan penyusunan tesis ini, di mana penulis mendapat kesempatan untuk memperdalam ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

Keberhasilan penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis sadari betul tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan juga selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya membimbing penulis.

3. Bapak Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH. MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya membimbing penulis.
4. Bapak Paulus Hadisuprpto, SH. MH. dan Bapak Eko Soponyono, SH. MH., selaku dosen penguji.
5. Ibu Ani Purwanti, SH. MHum., selaku Sekretaris I Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar atas bimbingannya serta seluruh Staf Akademik Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak Prof. Ignatius Ridwan Widyadharma, SH. MS. PhD., selaku pimpinan Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma and Associates atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
8. My beloved husband Antonius Raharjo Indragunawan, atas segala doa, dukungan, kesabaran, perhatian dan curahan tenaga serta pikiran.
9. Keluarga tercinta di Cemara dan Pancakarya atas segala doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
10. Rekan-rekan mahasiswa (teristimewa SPP Pagi-Angkatan 2000) Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan studi.
11. Rekan-rekan seprofesi pada Law Office Ignatius Ridwan Widyadharma and Associates atas dukungannya kepada penulis.

12. Pihak-pihak lain yang belum tersebut atas segala bantuan dan kerjasamanya.

Semoga segala kebaikan Bapak, Ibu dan rekan sekalian mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari betul bahwa penulisan dan penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu untuk makin menyempurnakan proses belajar ini, segala saran dan kritik yang membangun merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi penulis agar di kemudian hari dapat menyajikan sesuatu yang lebih baik lagi.

Semarang, September 2003

Penulis

Ira Widiastuti, SH

## ABSTRAKSI

Tiga persoalan pokok hukum pidana meliputi tiga hal, yaitu Perbuatan, Pertanggungjawaban Pidana dan Pidana. Kajian terhadap tiga hal tersebut bahkan menjadi bahasan intensif dalam Kongres PBB yang membahas pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana. Sementara masalah korban tindak pidana yang sesungguhnya memiliki korelasi signifikan terhadap kejahatan maupun pelakunya, belum begitu banyak mendapat perhatian.

Tidak adil rasanya membicarakan substansi hukum pidana tanpa memperhatikan kedudukan korban, khususnya di dalam menyusun kebijakan perundang-undangan pidana yang pada umumnya menjadi pedoman utama dalam upaya penegakan supremasi hukum.

Tulisan ini berangkat dari keinginan untuk mengetahui apakah di dalam merumuskan suatu kebijakan hukum pidana, para pembuat undang-undang telah memperhatikan aspek perlindungan korban ini. Hal ini mengingat korban sebenarnya menjadi pihak yang paling menderita akibat tindak pidana yang terjadi. Terhadap persoalan ini, penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban, namun bentuk perlindungan dimaksud belum konkrit, tidak langsung serta kurang tegas.

Berdasarkan hasil penelitian pula para korban menghendaki agar para pelaku tindak pidana memberikan ganti rugi, sebagai akibat dari tindakan yang mengakibatkan para korban mengalami kerugian dan penderitaan. Pemberian ganti rugi kepada korban dari pelaku tindak pidana ini diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk upaya perlindungan terhadap korban.

Oleh karena itu demi membangun upaya penegakan hukum yang berorientasi pada aspek perlindungan korban di masa mendatang perlu ada kajian teoritik maupun praktis terhadap kebijakan hukum pidana di berbagai negara (kajian komparatif), di samping melakukan pengamatan terhadap aspirasi para korban tindak pidana itu sendiri (kajian empirik).

## ABSTRACT

Three problem of legal crime cover three things, that is Deed, Responsibility of Crime and Crime. Study to the three things even become intensive discussion in Congress of PBB which studying prevention of badness and construction of perpetrator of doing an justice. Whereas problem of doing an injustice victim thruthfully have correlation of significant to badness and the perpetrator, not enough getting attention.

Inequitable likely discuss criminal law substance regardless of victim position, especially in compiling policy of legislation of crime which is on generally become especial guidance in the effort straightening of rule of law.

This article leave from desire to know do in formulating an policy of criminal law, lawmaker have paid attention aspect protection of this victim. This matter remember victim in fact become most suffering side effect of doing an injustice. For this problem, research indicate that policy of criminal law in fact also aim to give protection to victim, but form such protection not realized yet, indirect and also less coherent.

Base on the result of this research victims want that all of the perpetrator who doingan injustice give indemnation, as a consequence for the victim get of grief and loss. Giving of indemnation to victim of perpetrator is expected can become one of the form victim protection.

Therefore for make developing effort to straightening of law which orienting at aspect protection of victim in the future needed theoretic study and practical to policy of criminal law in various state (comparability study), beside do observation to aspiration of victim (empiric study).



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Persembahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstraksi .....	vii
Abstract .....	viii
Daftar Isi .....	ix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Kerangka Pemikiran .....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Perkembangan Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban .....	23
B. Pengertian Korban .....	45
C. Teori-Teori dan Tujuan Pemidanaan .....	53
D. Hubungan antara Pemberian Ganti Rugi Terhadap Korban Dan Tujuan Pemidanaan .....	57
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kebijakan Perundang-undangan Tentang Pidana Pemberian Ganti Rugi Yang Menjamin Perlindungan Terhadap Korban .....	66
1. Pidana Pemberian Ganti Rugi Dalam KUHP .....	66
2. Pidana Pemberian Ganti Rugi Dalam Perundang-undangan Di Luar KUHP .....	75
B. Prospek Kebijakan Perundang-undangan Tentang Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Perlindungan Terhadap Korban .....	111
1. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Di Beberapa Negara .....	111
2. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KKUHP) .....	128
3. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang .....	136

BAB IV	:	PENUTUP	
		A. Kesimpulan .....	150
		B. Saran .....	154

#### DAFTAR PUSTAKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kekerasan maupun kejahatan terus diusahakan, seiring dengan berkembangnya kuantitas maupun kualitas dari kejahatan tersebut. Kebijakan hukum (pidana) yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal bagaimana cara terbaik untuk menekan tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Bentuk-bentuk kejahatan baru seperti pelanggaran hak asasi manusia, *money laundering*, kasus SARA, dan lain-lainnya selalu mendapat perhatian serius dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan Internasional ini secara periodik menyelenggarakan konggres yang dikenal dengan nama *United Conggres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*.

Di dalam konggresnya yang kesembilan pada tanggal 29 April 1995 di Kairo banyak dibahas bentuk kejahatan modern seperti kejahatan ekonomi

transnasional dan berbagai bentuk kejahatan terorganisir yang terjadi inter-antar negara. Namun demikian kebijakan yang direkomendasi melalui konggres tersebut pada umumnya masih terfokus pada upaya serius tentang bagaimana cara menanggulangi terjadinya kejahatan dimaksud, di samping mencari upaya efektif bagaimana memperlakukan pelakunya dengan adil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan memang telah mendapat perhatian secara sungguh-sungguh baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional, namun titik berat kajian yang dilakukan masih tetap terletak pada aspek penanggulangan atau pencegahan terhadap "perbuatan" atau bentuk "kejahatan" saja.

Perkembangan lebih lanjut yang dijumpai akhir-akhir ini adalah melangkah ke tahap pembicaraan mengenai persoalan "sanksi pidana". Dari sini mulai dipersoalkan sekaligus dipertanyakan mengenai seberapa jauh efektifitas dari pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Apabila dilihat kembali judul konggres yang mengetengahkan persoalan *Treatment of Offender*, hal ini menunjukkan bahwa kenyataannya perhatian internasionalpun pada hakikatnya dipengaruhi dengan

adanya perkembangan kajian terhadap masalah sanksi pidana ini di samping tentu saja terhadap si "pelaku".

Berdasarkan hasil kajian persoalan sanksi pidana ini, maka pemikiran yang tampak menonjol adalah mengenai setuju-tidaknya terhadap pemberian sanksi pidana itu sendiri. Alf Ross tetap memandang perlunya sanksi pidana, dikatakan bahwa konsep pemidanaan itu bertolak pada dua tujuan yaitu : <sup>1</sup>

1. Untuk mengenakan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan (*punishment is aimed at inflicting suffering upon the person upon whom its imposed*), dan
2. Pidana itu merupakan satu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku (*the punishment is an expression of disapproval of the action for which it is imposed*).

Roeslan Saleh berpendapat masih perlunya pidana dan hukum pidana, antara lain dengan alasan bahwa pidana dan hukum pidana itu tidak semata-mata ditujukan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat<sup>2</sup>.

Perlu ditegaskan di sini bahwa walaupun pembahasan mengenai perlu-tidaknya penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana itu mengalami

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hal. 21-22

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta, 1994, hal. 5.

kemajuan pesat dewasa ini, namun ide dasar penanggulangan kejahatan dengan pemberian sanksi pidana pada hakikatnya merupakan cara yang paling tua. Ratusan tahun yang lampau, Immanuel Kant sudah mengatakan bahwa pidana itu merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Di samping perhatian hukum pidana diarahkan pada perbuatan dan pidana itu sendiri, maka masih ada satu hal lagi yaitu mengenai hal yang bertalian dengan pelaku tindak pidana itu sendiri. Kajian terhadap pelaku tindak pidana erat kaitannya dengan persoalan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan pidana yang dilakukan. Seperti yang dikemukakan oleh Idema bahwa membahas mengenai kesalahan (seseorang) justru merupakan "jantungnya" hukum pidana<sup>3</sup>.

Oleh karena itu sangat tepat apabila Roeslan Saleh berpendapat bahwa meskipun mengenai kesalahan telah dikemukakan dalam setiap pengkajian hukum pidana sebagai hal mendasar, namun masih perlu dikaji lagi, dan masih terlihat hal-hal baru. Hal-hal baru itulah yang perlu dikemukakan kepada mereka yang melanjutkan studi hukum pidananya<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1992, hal. 86.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, 1994, *Op Cit*, hal. 20.

Di sini terlihat bahwa tiga persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu telah banyak memberikan pengaruh besar bagi perkembangan hukum pidana, khususnya ditinjau dari aspek kebijakan kriminal.

Di samping itu Barda Nawawi Arief juga mengingatkan bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan tehnik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik, namun kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan nasional pada umumnya<sup>5</sup>.

Berdasarkan alasan ini, sangat beralasan apabila kebijakan hukum pidana dalam rangka perlindungan korban sangat terkait dengan *criminal law application* sebagaimana yang dimaksud oleh GP. Hoefnagels. Jika disatu sisi ada kebijakan *prevention without punishment*, maka kebijakan hukum pidana diasumsikan sebagai model *prevention with punishment*.

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

Sementara itu persoalan korban sendiri, pada kenyataannya masih kurang mendapat perhatian yang sepadan dengan tiga persoalan pokok di atas. Padahal sangat dirasakan bahwa di dalam suatu tindak pidana, banyak pihak mengakui bahwa korbanlah sebenarnya yang paling mengalami penderitaan dan kerugian. Menurut Iswanto, korban dipandang sebagai persoalan pokok yang seharusnya juga mendapat perhatian yang berimbang di samping perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana. Bila hal ini dilakukan, maka masalah kejahatan dapat dijelaskan lebih baik sesuai kenyataan yang sebenarnya<sup>6</sup>.

Dengan bertitik tolak pada tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, di mana salah satunya yaitu adanya pidana, maka salah satu bentuk kebijakan hukum pidana ini adalah adanya pengaturan berupa pemberian ganti rugi sebagai upaya perlindungan terhadap korban. Konsep KUHP Tahun 1999/2000 (selanjutnya disebut KUHUP) sebagai sarana pembaharuan dalam bidang hukum pidana mengatur secara tegas perihal pembayaran ganti rugi seperti yang tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) KUHUP, yaitu sebagai berikut :

Pidana tambahan terdiri atas :

---

<sup>6</sup> Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, UGM, Yogyakarta, 1995, hal. 6.



- a. Pencabutan hak tertentu ;
- b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan ;
- c. Pengumuman putusan hakim ;
- d. Pembayaran ganti kerugian ; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

Dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) sub d KUHPP tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran ganti kerugian merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 92 KUHPP disebutkan bahwa

- (1) Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaksanakan, maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda.

Apabila dibandingkan dengan KUHP yang sekarang berlaku, maka pengaturan mengenai ganti rugi tidak diatur sama sekali dalam Pasal 10 KUHP warisan kolonial tersebut. Untuk lebih jelasnya Pasal 10 KUHP berbunyi sebagai berikut :

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok.
  - 1. pidana mati,
  - 2. pidana penjara,
  - 3. kurungan,
  - 4. denda,
  - 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
  - 1. pencabutan hak-hak tertentu,

2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Dilihat dari ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut sama sekali tidak tercantum jenis pidana berupa ganti rugi. Namun terdapat pasal lain dalam KUHP yaitu Pasal 14c ayat (1) yang seolah-olah berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP menyebutkan "Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi". Penggantian kerugian baik semua atau sebagian oleh terpidana kepada korbannya belumlah dapat dikatakan sebagai bentuk sanksi pidana, namun seolah-olah hanya merupakan pengganti pidana pokok saja.

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pemberian ganti rugi kepada korban barulah diupayakan untuk dimasukkan sebagai salah satu jenis pidana tambahan dalam KUHUP. Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, maka negara seperti New Zealand dan Inggris

telah mencoba gagasan untuk memberi ganti rugi atau santunan kepada korban kejahatan oleh negara. Gagasan ini dapat pula dijadikan bahan pertimbangan bagi negara Indonesia untuk memasukkan konsep/pemikiran mengenai pemberian ganti rugi dalam penyusunan KUHUP sekarang ini.

Pada hakekatnya pemberian ganti rugi sebagai upaya perlindungan terhadap korban, sudah diatur pula oleh hukum pidana positif yang berlaku saat ini, namun lebih mengarah pada bentuk perlindungan secara tidak langsung.

Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban<sup>7</sup>.

Mengenai penetapan ganti rugi yang harus dibayar oleh terdakwa kepada korban atau warisnya adalah baik. Dengan ketentuan ini maka secara diam-diam sifat

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 61

hukum pidana agak bergeser ke sifat keperdataan. Memang perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi menunjukkan perluasan optiknya, perhatiannya tidak hanya tertuju kepada kejahatan dan pembuatnya seperti dulu-dulu, akan tetapi juga kepada orang-orang selain pembuat, ialah korban, orang yang menyaksikan, anggota-anggota masyarakat lainnya<sup>8</sup>.

Di lain pihak Barda Nawawi Arief mengemukakan pula bahwa ganti rugi untuk perkara pidana pada umumnya di Indonesia lebih bersifat keperdataan walaupun diberikan lewat proses pidana. Adanya kemungkinan ganti rugi menurut Pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana; ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada korban (*victim*)<sup>9</sup>.

Selain dari aspek pembaharuan hukum pidana yang melahirkan konsep pemberian ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi pidana, ada pula pertimbangan lain

---

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1984, hal. 196-197.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 61

dengan diimplementasikannya pemberian ganti rugi ini ke dalam kebijakan pidana di Indonesia, yaitu dikarenakan jenis sanksi pidana lain seperti pidana penjara, yang selama ini paling banyak dijatuhkan justru dirasakan kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan studi efektivitas pidana, ternyata pidana penjara sebenarnya merupakan pidana yang kurang efektif; yang lebih dan paling efektif justru pidana denda. Namun dalam kenyataannya justru pidana penjara yang paling banyak dijatuhkan<sup>10</sup>.

Dengan berbagai alasan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa telah ada perubahan cukup mendasar terhadap persoalan kedudukan korban ini di tengah masyarakat. Pada awalnya peranan korban memang cukup menonjol, yaitu ketika masalah hubungan hukum antara seorang dengan orang lain pada masa itu dipandang sebagai urusan individu. Tetapi kemudian zaman berubah, karena urusan hukum terutama masalah kejahatan berkembang menjadi urusan penguasa atau negara. Pada saat ini kedudukan korban dapat dikatakan mengalami kemunduran, bahkan dalam sistem peradilan hampir tidak tampak perannya. Jika semula korban menjadi subyek di dalam menuntut keadilan, maka

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 119-120.

setelah negara mengambil alih wewenang ini peran tersebut menjadi hilang. Munculnya paradigma baru, khususnya sejak pemikir-pemikir kritis kriminologi lahir setelah tahun enampuluhan, makin terlihat adanya perhatian kembali terhadap kedudukan korban kejahatan ini, sehingga di dalam sistem peradilan, ia kembali ditempatkan sebagai subyek yang diakui hak-haknya. Dengan demikian, maka korban bisa dikatakan telah mendapatkan pengakuan kembali di dalam masyarakat, yang perlu mendapat perlindungan, sejajar dengan pelaku serta subyek-subyek hukum lainnya.

Atas dasar pemikiran di atas, maka kajian dan ulasan pengaturan kebijakan pidana mengenai pemberian ganti rugi sebagai upaya perlindungan terhadap korban menjadi amatlah penting untuk diaktualisasikan dalam KUHP Indonesia mendatang dan juga dalam produk-produk perundangan di luar KUHP.

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dan berlandaskan pada latar belakang seperti yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan perundang-undangan tentang pidana pemberian ganti rugi yang ada selama ini sudah menjamin upaya perlindungan terhadap korban ?
2. Apa saja hal-hal yang sepatutnya dirumuskan dalam kebijakan perundang-undangan tentang pemberian pidana ganti rugi terhadap korban ?

Guna menghindari meluasnya cakupan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi penelitian ini hanya terhadap :

1. Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang memuat ancaman pidana pembayaran ganti rugi.  
Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana Undang-undang tersebut menjamin perlindungan korban.
2. Gambaran kebijakan pidana yang mengatur perlindungan terhadap korban yang bersifat prospektif yang diuraikan berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan kebijakan Perundang-undangan mengenai pemberian ganti rugi sudah menjamin upaya perlindungan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang patut dirumuskan dalam kebijakan perundang-undangan tentang pemberian ganti rugi terhadap korban.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan untuk menambah wacana tentang perlindungan korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya di bidang kebijakan pidana yang berkaitan dengan upaya pemberian ganti rugi dan prospeknya pada masa mendatang.

#### E. Kerangka Pemikiran

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana merupakan salah satu komponen penting dari ilmu hukum pidana modern. Kebijakan hukum pidana ini



diistilahkan dengan *Penal Policy*, sejajar dengan komponen penting lainnya, yaitu *Criminology* dan *Criminal Law*<sup>11</sup>.

Dikemukakan lebih lanjut, *Penal Policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-undang, tetapi juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan hukum pidana memiliki cakupan yang cukup luas dalam mengimplementasikan kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini.

Usaha pembaharuan hukum pidana itu sendiri, dilakukan dengan mempelajari aspek-aspek teoritik dasar yang menjadi obyek studi hukum pidana dan juga cabang-cabang ilmu sosial lainnya yang bersifat fenomenal. Barda Nawawi Arief mengatakan<sup>12</sup>

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Op Cit, hal. 23

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Op Cit, hal. 30-31

melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentraal sosio politik, sosio filosofik dan sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan hukum Indonesia”.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Sudarto mendefinisikan politik kriminal sebagai “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”<sup>13</sup>. Politik kriminal ini adalah bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang mencakup pula penegakan hukum perdata dan penegakan hukum administrasi, dan politik penegakan hukum merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yang merupakan usaha setiap masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara<sup>14</sup>.

Pemberian ganti rugi sebagai wujud dari perlindungan kepada korban dapat menjadi pidana alternatif untuk mengganti pidana penjara pendek, sebab pidana perampasan kemerdekaan itu sendiri sedapat mungkin harus digunakan secara hati-hati. Sehubungan dengan penggunaan hukum pidana, Nigel Walker mengingatkan beberapa prinsip pembatas antara lain :<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Op cit, hal. 3

<sup>14</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, 1990, hal. 5-6

<sup>15</sup> Nigel Walker dalam Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 43

- a. Jangan hukum pidana (HP) digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan ;
- b. Jangan menggunakan HP untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan / membahayakan ;
- c. Jangan menggunakan HP untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan ;
- d. Jangan menggunakan apabila kerugian / bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian / bahaya dari perbuatan / tindak pidana itu sendiri ;
- e. Larangan-larangan HP jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang dicegah ;
- f. HP jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik ;
- g. HP jangan memuat larangan / ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan / dipaksakan (*unenforceable*).

Untuk mengetahui sesuatu hal itu bermanfaat atau tidak, yang harus kita lihat pertama-tama adalah tujuan yang hendak dicapai melalui hal tersebut. Demikian pula dengan keberadaan ganti rugi sebagai sanksi dalam hukum pidana, tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu :

Tujuan memasukkan ganti rugi dalam Hukum Pidana menurut Gallaway adalah :

1. *To benefit the offender ;*
2. *To benefit the victim ;*
3. *To benefit the criminal justice ;*
4. *To help in doing justice ;*
5. *To benefit the program it self<sup>6</sup>.*

<sup>16</sup> I.B. Surya Dharma Jaya, *Ganti Kerugian sebagai Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, dalam Kertapatrika, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1994, hal. 347

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan masalah kebijakan hukum pidana yang mengatur mengenai pemberian ganti rugi, maka penelitiannya berorientasi pada kebijakan. Pendekatan yang dipergunakan berorientasi pula pada tujuan, pendekatan rasional, pendekatan ekonomis dan pragmatis serta pendekatan yang berorientasi pada nilai<sup>17</sup>. Dengan pendekatan kebijakan ini, diharapkan akan dapat diperoleh gambaran pengaturan perlindungan korban dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Metode pendekatan kebijakan hukum ini, dilakukan terutama dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini di samping menggunakan pendekatan yuridis normatif, juga digunakan pendekatan yuridis empiris (aplikatif) dan pendekatan komparatif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini, yaitu masalah kebijakan hukum pidana di Indonesia mengenai pemberian ganti rugi, dilakukan dengan jalan

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 86.

mengungkap kaidah-kaidah normatif dan asas-asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan perlindungan korban dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya dalam perundang-undangan hukum pidana dan penerapannya di Indonesia.

Berdasarkan cakupan penelitian hukum normatif tersebut di atas, maka penelitian ini dibatasi pada perbandingan hukum, yaitu dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat mengenai pemberian ganti rugi sebagai salah satu sanksi pidananya.

Pendekatan yuridis komparatif, dimaksudkan untuk melakukan perbandingan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat sanksi pemberian ganti rugi dengan peraturan yang terdapat dalam KUUHP. Pendekatan yuridis komparatif ini juga dimaksudkan untuk memberikan masukan sehubungan prospek pemberian ganti rugi sebagai implementasi kebijakan pidana di Indonesia.

Pendekatan yuridis empiris (aplikatif) dimaksudkan untuk dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan korban dalam proses penjatuhan pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana praktek

pemberian perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana, maka diharapkan akan diperoleh masukan dalam rangka penyusunan kebijakan legislatif pada masa yang akan datang khususnya dalam upaya pembentukan KUHP nasional.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, penelitian yang utama adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena itu dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder<sup>18</sup>.

Data sekunder memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready made*) ;
2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu ;
3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat<sup>19</sup>.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau risalah perundang-undangan, konsep (rancangan)

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 11.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan IV, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 24.

undang-undang, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya serta pendapat ahli dan ensiklopedi<sup>20</sup>.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif kualitatif. Dikatakan yuridis normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini selain bermaksud untuk menggambarkan data atau objek penelitian, juga berupaya untuk memberikan argumentasi tentang bagaimana suatu kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi itu dibuat dan dijalankan serta prospeknya.

### G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan.

Bab II Tinjauan Pustaka, terdiri dari 4 sub bab, yaitu sub bab A. Pengertian dan Perkembangan Pemberian Ganti Rugi kepada Korban, sub bab B.

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Op cit, hal. 11-12.

Pengertian Korban, sub bab C. Teori-teori dan Tujuan Pemidanaan dan sub bab D. Hubungan antara Ganti Rugi terhadap Korban dan Tujuan Pemidanaan.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari 2 sub bab, yaitu sub bab A. Kebijakan Perundang-undangan tentang Pidana Pemberian Ganti Rugi yang Menjamin Perlindungan Terhadap Korban dan sub bab B. Prospek Kebijakan Perundang-undangan tentang Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Perlindungan terhadap Korban.

Bab IV Penutup terdiri dari 2 sub bab, yaitu sub bab A. Kesimpulan dan sub bab B. Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian dan Perkembangan Pemberian Ganti Rugi Kepada Korban

Pada hakikatnya pemberian ganti rugi kepada korban, bukanlah hal baru dalam hukum pidana. Menurut Stephen Schafer, ganti rugi sebagai sanksi pidana telah dikenal sejak masa hukum primitif. Pada masa itu telah dikenal adanya *personal reparation*, yaitu semacam pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana atau keluarganya kepada korban yang telah dirugikan sebagai akibat tindak pidana tersebut. Pada masa sebelum adanya pemerintahan, atau dalam masyarakat yang masih berbentuk suku-suku (*tribal organization*) bentuk-bentuk hukuman seperti ganti rugi, merupakan sesuatu yang biasa terjadi<sup>21</sup>. Sanksi ganti rugi merupakan suatu tanggung jawab pribadi pelaku tindak pidana kepada pribadi korban, didasarkan pada filsafat *an eye for an eye*.

Bilamana dilihat pada sejarah perkembangan hukum (hukum pidana), maka pada mulanya reaksi terhadap pelanggaran adalah sepenuhnya hak (dan kewajiban) korban. Akibat dari dendam (darah) yang sering tidak

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana, BPHN, Jakarta, 1992, hal.1

berkeputusan, telah timbul keadaan bahwa lambat laun 'ganti rugi' oleh pelanggar dapat 'dibayar dengan harta'<sup>22</sup>.

Pada waktu korban masih berhak menuntut 'pembalasan' atau 'ganti rugi' terhadap atau dari pelaku pelanggaran, maka peranan atau 'sumbangan' korban dalam terjadinya pelanggaran wajib diperhatikan dan menentukan besar kecilnya 'pembalasan' atau 'ganti rugi' itu<sup>23</sup>.

Ganti rugi yang diberikan kepada korban dibedakan antara yang dibayarkan oleh instansi resmi dari dana negara (kompensasi) dan yang dibayarkan oleh pelaku (restitusi). Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dibagi menjadi dua, pertama dimana negara merasa turut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku misalnya dalam kasus perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. Kedua dimana instansi resmi negara memang bertanggungjawab atas terjadinya penderitaan korban itu, misalnya dalam hal *judicial error, wrongfull imprisonment, arbitrary arrest or detention*<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d./h Lembaga Kriminologi UI), Jakarta, 1994, hal. 75

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid, hal. 94

Dalam hal restitusi, mekanisme untuk memperoleh pembayaran dari pelaku sering dikaitkan dengan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku tidak mau dalam arti tidak bersedia memberikan pembayaran (restitusi) tersebut, maka jalan yang seyogyanya ditempuh adalah dengan memberikan ancaman hukuman yang lebih berat.<sup>25</sup>

Pendapat yang pada awalnya berkembang adalah untuk mengadakan kemudahan dalam perbaikan dan pemberian ganti rugi dengan perintah dari pengadilan pidana. Tindakan ini terhadap penjahat bersifat penghukuman, dan mungkin merupakan tindakan pelaksanaan yang umumnya tidak bersifat menghukum, yang merupakan faham positif khususnya telah menjadi populer dewasa ini. Beberapa negara bagian Amerika Serikat dipermulaan abad ke-19 telah mempunyai undang-undang yang menyatakan bahwa seorang yang dinyatakan melakukan pencurian mesti mengembalikan kepada pemiliknya dua kali nilai miliknya yang tercuri<sup>26</sup>.

Bahkan di Amerika Serikat sendiri baru pada tahun 1982 ditetapkan suatu UU Federal, dinamakan *Victim and Witness Protection Act of 1982*, yang ingin mengadakan perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban atau saksi dari intimidasi sebagai tindakan legislatif (di

<sup>25</sup> Ibid, hal. 95

<sup>26</sup> Sudjono D, *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1974, hal. 49

samping soal ganti rugi yang diberikan kepada korban, khususnya dari delik-delik kekerasan). Adalah suatu hak pula dari saksi atau korban tersebut, agar supaya mereka mendapat perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan intimidasi dan memperoleh ganti rugi (*compensation* ataupun *restitution*), yang sekarang merupakan perkembangan perundang-undangan baru<sup>27</sup>.

Sistem Peradilan Pidana Indonesia sekarang ini dirasakan tidak/kurang memberi kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar (dirugikan), maka diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang hal itu. Kerugian yang dialami oleh korban, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : kerugian yang bersifat materiil (dapat diperhitungkan dengan uang) dan kerugian yang sifatnya immateriil (misalnya perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain).

Sehubungan dengan tanggung jawab negara menjamin keamanan para warga, maka dianggap wajar bahwa pemerintahlah yang mengambil prakarsa menyediakan sarana yang memungkinkan bantuan kepada korban yang mengalami kerugian immateriil. Sedangkan bagi korban yang mengalami penderitaan

---

<sup>27</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hal. 13-14

secara materiil, pelakulah yang menyediakan ganti rugi itu.

Indonesia dengan falsafah negara Pancasila, patut memperhatikan kedudukan korban dalam tindak pidana (khususnya mengenai hal ganti rugi). Pemikiran ini kiranya dapat dirumuskan dan dituangkan dalam kebijakan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana berupa pemberian ganti rugi terhadap korban. Pada kenyataannya sampai saat ini, produk perundangan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi terhadap korban, masih dirasa sangat minim sekali.

Sudarto mengemukakan dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Menjalankan politik hukum pidana juga mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna<sup>28</sup>.

Implementasi kebijakan pidana di Indonesia yang berkaitan upaya pemberian ganti rugi yang tertuang dalam hukum materiil, dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kebijakan pidana berupa

---

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung, 1983, hal. 161.

pemberian ganti rugi ini seiring dengan semangat pembaharuan di bidang hukum pidana, juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan.

Berbicara mengenai masalah ganti rugi dalam tindak pidana berkaitan dengan jenis sanksi pidana. Sanksi pidana itu sendiri dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah melakukan suatu kejahatan. Jadi ganti rugi merupakan bentuk sanksi pidana yang diwajibkan dibayarkan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Ini merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban (*victim oriented*).

Selama ini dalam praktek, apabila pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana. Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

A. Pidana pokok.

1. pidana mati,
2. pidana penjara,
3. kurungan,
4. denda,
5. pidana tutupan.

B. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu,
3. pengumuman putusan hakim.

Dari ketentuan mengenai jenis sanksi pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, tampak jelas bahwa sanksi pidana berupa pemberian ganti rugi belum diakomodir dalam jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Jadi ilmu hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat<sup>29</sup>.

Aspek kebijakan perlindungan/kesejahteraan masyarakat (dalam hal ini korban kejahatan) inilah yang dirasakan belum tersentuh secara substansial dalam kebijakan pidana yang ada sekarang ini. Padahal disadari bersama bahwa masalah perlindungan korban merupakan masalah yang mendapat perhatian yang cukup serius dari dunia internasional.

Dalam Kongres PBB VII/1985 di Milan tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*"

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op Cit, hal. 99

dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogyanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*"victim`s rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system"*)<sup>30</sup>. Dalam Kongres ke-7 tersebut diajukan rancangan resolusi tentang perlindungan korban, yang kemudian dijadikan Resolusi MU-PBB No. 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985 tentang *"Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power"*, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban ialah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan<sup>31</sup>.

Perhatian terhadap perlindungan korban kejahatan juga telah diterima sebagai resolusi PBB No.40/34 tentang *"Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power"*. Muladi mengutip beberapa ketentuan penting dari resolusi tahun 1985 tersebut, antara lain sebagai berikut <sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> Ibid, hal. 53

<sup>31</sup> Ibid, hal. 54.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal.86



*"6. The responsiveness of judicial and administrative processes to needs of Victims should be facilitated by :*

*a. ....*

*b. Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interest and consistent with the relevant national criminal justice system.*

Dalam deklarasi tersebut juga diatur tentang restitusi, kompensasi dan asistensi pada korban yang berbunyi sebagai berikut <sup>33</sup> :

*"8. Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate make fair restitution to victims. Their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses occurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights.*

*9. Government should be review their practices, regulation and law to consider restitution as an available sentencing option in criminal cases, in addition to other criminal sanction.*

*.....*

*12. When compensation is not fully available from the offender or other sources, States should endeavour to provide financial compensation.*

Dilihat dari statement dalam resolusi PBB tersebut, jelas bahwa masalah perlindungan korban tindak pidana bukan hanya sekedar menjadi kebijakan hukum pidana nasional, akan tetapi telah diakui pula sebagai kebijakan yang bersifat internasional. Konsekuensinya adalah

---

<sup>33</sup> Ibid.

negara-negara wajib mematuhi resolusi tersebut. Karena kebijakan hukum pidana ini menyangkut masalah perundang-undangan, maka yang harus dilakukan adalah melihat dan meninjau kembali; apakah peraturan hukum pidana positif yang ada telah memenuhi aspek perlindungan korban. Sedangkan dalam pembuatan perundang-undangan baru, seyogyanya pembuat harus memasukkan klausul perlindungan korban secara jelas dan tegas.

Oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya jika kemudian timbul gagasan untuk memasukkan ide dasar mengenai pemberian ganti rugi yang berkaitan dengan korban dalam produk kebijakan pidana di Indonesia, dikarenakan KUHP yang ada sekarang belumlah mampu mengakomodir akan hal itu. Dengan demikian diupayakan sedapat mungkin pengaturan pemberian ganti rugi dapat diaktualisasikan dalam KUHP Indonesia mendatang, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 62 ayat (1) jo. 92 Konsep KUHP Tahun 1999/2000 (selanjutnya disingkat KUHPP).

Pasal 62 ayat (1) KUHPP, berbunyi sebagai berikut :

Pidana tambahan terdiri atas :

a. Pencabutan hak tertentu ;

- b. Perampasan barang tertentu dan atau tagihan ;
- c. Pengumuman putusan hakim ;
- d. Pembayaran ganti kerugian ; dan
- e. Pemenuhan kewajiban adat.

Dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) sub d KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa pembayaran ganti kerugian merupakan salah satu jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Masalah ganti rugi adalah masalah yang kompleks sekaligus rumit. Oleh karena itu untuk mendapatkan gambaran secara proporsional, maka masalah ganti rugi harus didekati secara interdisipliner. Salah satu di antaranya adalah dari disiplin ilmu Viktimologi. Menurut Arif Gosita dalam bukunya yang berjudul "Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban" disebutkan bahwa Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal (sic.) sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi adalah bagian dari kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama, yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut. Antara lain sebab dan akibatnya, yang dapat

merupakan faktor viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen (menimbulkan kejahatan)<sup>34</sup>.

Gagasan pengenaan ganti rugi ini boleh dikatakan gagasan yang maju, dalam arti bahwa orang yang dirugikan dalam perkara pidana atau yang dapat disebut "si-korban" mendapat perhatian<sup>35</sup>.

Gagasan tersebut dikenal dengan istilah *victim oriented*, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada korban. Jadi keberadaan hukum pidana tidak semata-mata berorientasi kepada pelaku tindak pidana saja dengan memberikan suatu sanksi pidana, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban yang nyata-nyata telah dirugikan. Gagasan tersebut dirasakan menjadi sangat penting dikarenakan sampai saat ini justru hukum pidana yang berorientasi kepada pelaku yang masih banyak dijumpai.

Kedudukan korban atau orang yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini sangat memedihkan, korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan pidana dan praktek penyelenggaraan hukum pidana hanya menaruh perhatian kepada si pembuat, ialah orang

---

<sup>34</sup> Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1986, hal. 10-11

<sup>35</sup> Sudarto, 1983, Op cit, hal. 191

yang melakukan tindak pidana. Hal ini memang merupakan hasil perkembangan hukum<sup>36</sup>.

Melihat kenyataan tersebut tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa upaya pemberian ganti rugi kepada korban merupakan aktualisasi dari kebijakan hukum pidana di Indonesia untuk memberikan bentuk perlindungan secara langsung kepada korban.

Saat ini yang penting adalah kesediaan menanggapi masalah-masalah korban menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional dan interdisipliner. Maka adanya usaha yang dianggap cukup relevan untuk mengidentifikasikan, menyoroti dan menelaah persoalan yang menyangkut masalah kedudukan si korban dalam tindak pidana dari sudut hukum pidana dan kriminologi harus dihargai dan disambut dengan gembira.

Di Indonesia hingga saat ini masalah ini belum ditanggapi secara sungguh-sungguh bersama dan secara resmi terbuka. Sebabnya masih perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga merupakan gejala umum di negara-negara lain, baik di negara yang sudah maju atau negara sedang berkembang. Berhubung masalah korban ini diakui sebagai masalah universal kemanusiaan maka antara lain telah diadakan kegiatan bersama secara international

---

<sup>36</sup> Sudarto, 1983, Loc cit.

pada simposium mengenai korban/victimologi di Jerusalem 1973 dalam *"First International Symposium on Victimology"*. Selanjutnya *"Second International Symposium on Victimology"* diadakan pada tanggal 5-11 September 1976 di Boston Massachusetts, Amerika. Bila kita ingin menanggapi suatu kejahatan, delikwensi dan deviasi menurut proporsi yang sebenarnya dengan meninjau secara dimensionil, maka si korban tidak boleh diabaikan dalam terjadinya kejahatan, delikwensi dan deviasi<sup>37</sup>.

Hubungan penjahat-korban bukanlah masalah yang baru; hanya saja, selama berabad-abad merupakan salah satu subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran dalam usaha mengerti masalah kejahatan, delikwensi dan deviasi.

Berkaitan dengan konsep pemberian ganti rugi, Stephen Schafer, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, mengemukakan terdapat 5 (lima) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu :

---

<sup>37</sup> Arief Gosita, 1986, Op cit, hal. 137-138.

1. Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana. Pemeriksaan tuntutan kompensasi yang demikian dalam proses pidana, di Jerman disebut dengan istilah "*Adhasionprozess*".
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana ("punitif")-nya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini ialah "denda kompensasi" (*compensatory fine*) yang dikenal dengan istilah "*Busse*" (di Jerman dan Swiss). Denda ini merupakan "kewajiban yang bernilai uang" (*monetary obligation*) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara yang memenuhi/menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5. Kompensasi yang bersifat netral, diberikan melalui prosedur khusus. Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak 1963) dan di Inggris (sejak 1964). Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti rugi, sedangkan si pelaku dalam keadaan bangkrut dan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi kepada korban. Yang berkompeten memeriksa bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus/tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban<sup>38</sup>.

Selanjutnya Stephen Schafer juga membedakan istilah kompensasi dengan restitusi. Kompensasi lebih

<sup>38</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 59-60.

bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*), sedangkan restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana (*the responsibility of the offender*).

Berkaitan dengan kelima sistem yang dikemukakan di atas, menurut Barda Nawawi Arief, sistem ganti rugi di Indonesia lebih dekat dengan sistem ke-1 sampai dengan ke-3. Namun ganti rugi untuk perkara pidana pada umumnya lebih bersifat keperdataan walaupun diberikan lewat proses pidana. Jadi lebih mendekati sistem ke-2, yaitu *Adhasionprozess* atau *Adhesive procedure*. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan KUHAP yang diperuntukkan bagi perkara pidana umum<sup>39</sup>.

Dalam hukum pidana formil ( KUHAP ), pengertian "ganti rugi" atau kerugian dapat dijumpai dalam beberapa pasal antara lain :<sup>40</sup>

1. Pasal 1 butir 22 menyebutkan bahwa Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 61.

<sup>40</sup> M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1992, hal. 5



yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Sedangkan dalam Pasal 99 disebutkan, bahwa kerugian ini berarti "biaya yang telah dikeluarkan". Pengertian ini termasuk /meliputi di antaranya biaya pengobatan atau biaya pemulihan cacat yang langsung diderita oleh saksi korban.

Istilah ganti rugi itu sendiri sebenarnya merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat "wanprestasi" dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang<sup>41</sup>.

Dalam KUHP, pengertian ganti rugi merupakan ganti rugi terbatas terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHP karena jumlah yang dapat dimintakan, telah dibatasi sedang pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, pembatasan demikian untuk meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena kesalahan pihak lain tersebut<sup>42</sup>.

Hingga saat ini, hukum pidana belum banyak mengatur soal perlindungan korban tindak pidana di dalam kebijakan aplikatif, khususnya berkenaan dengan pemberian sanksi pidana. Kebijakan hukum pidana yang ada tampaknya itu lebih berorientasi pada aspek "perlindungan masyarakat" karena itu hukum pidana ini kemudian lebih dikenal sebagai "hukum publik".

---

<sup>41</sup> Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977, hal.3

<sup>42</sup> Ibid, hal. 5

Namun demikian bukan berarti pengaturan hukum pidana sama sekali tidak memperhatikan aspek perlindungan korban. Menurut Barda Nawawi Arief, aspek perlindungan korban sebenarnya tetap ada tetapi bersifat abstrak. Di dalam salah satu tulisannya beliau mengatakan<sup>43</sup> :

“.... Dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma / tertib hukum “in abstracto”. Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “in concreto”, tetapi “in abstracto”.

Dengan demikian Barda Nawawi Arief melihat bahwa sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana tidak ditujukan terhadap kerugian-kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkrit, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

---

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal.55

Barda Nawawi Arief lebih lanjut mengemukakan<sup>44</sup> :

“Dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban potensial. Hal ini terlihat misalnya pada pidana pokok berupa pidana mati dan pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula pada jenis-jenis pidana tambahan berupa “pencabutan hak-hak tertentu”, “perampasan barang-barang tertentu” dan “pengumuman putusan hakim”.

Meskipun pada umumnya perlindungan korban yang dimaksud bersifat tidak langsung, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa dalam hal-hal tertentu hukum pidana positif (materiil/formil) memberi perhatian juga kepada korban secara langsung. Beliau mengisyaratkan hal ini dengan menunjuk pasal-pasal yang tertulis dalam enam Undang-undang, yaitu :

1. Pasal 14 c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yaitu dalam hal hakim hendak menjatuhkan pidana bersyarat, ia dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk “mengganti kerugian” yang timbul dari tindak pidana.

2. Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi Pasal 8 sub d No. 7 Drt. Tahun 1955.

---

<sup>44</sup> Ibid, hal.56

Pasal ini memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi "Tata Tertib" atas biaya si terhukum.

3. Pasal 34 sub c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 Tahun 2001.

Isinya memberi peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan benda yang diperoleh dari korupsi.

4. Bab XIII (pasal 98-101) KUHAP Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Intinya memberi kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, sehingga dalam putusan hakim berwenang menetapkan hukuman " pengganti biaya" yang telah dikeluarkan pihak-pihak yang dirugikan.

5. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47 sub c, sub d, dan sub e.

6. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63.

Atas dasar penafsiran enam undang-undang tersebut di atas, Barda Nawawi Arief mengidentifikasikan empat bentuk kemungkinan pemberian ganti rugi langsung dalam hukum pidana positif sebagai berikut :

- a. Pemberian ganti rugi sebagai “syarat khusus” dalam pidana bersyarat ( KUHP )
- b. Memperbaiki akibat-akibat dalam tindak pidana ekonomi sebagai tindakan tata tertib (Undang-undang No. 7 Drt 1955)
- c. Pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, sebagai pidana tambahan (Undang-undang No. 31 Tahun 1999)
- d. Penggantian biaya yang telah dikeluarkan dalam proses penggabungan gugatan ganti rugi (perdata) dalam perkara pidana (KUHP)
- e. Bentuk-bentuk tindakan sebagai sanksi pidana/tindakan yang dapat dikatakan merupakan bentuk-bentuk pemberian restitusi dalam tindak pidana lingkungan hidup (Undang-undang No.23 Tahun 1997)
- f. Pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan dalam kebijakan perlindungan konsumen (Undang-undang No.8 Tahun 1999)

Hal menarik yang dijumpai di sini adalah mengenai siapa yang bertanggungjawab memberikan ganti rugi

atau uang pengganti yang disebut dalam undang-undang di atas. Di sini terlihat bahwa pelaku atau terpidanalah yang paling bertanggung jawab atas pembayaran tersebut, meskipun ada pula ketentuan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan RI No.983/KMK.01/1983 tanggal 31 Desember 1983 sebagai pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang mengatur dalam hal pejabat melakukan kesalahan, kealpaan atau kelalaian, maka tanggung jawab pembayaran dibebankan kepada negara. Ini menunjukkan bahwa peran negara sebagai pelindung masyarakat (korban) masih sangat kecil, lebih-lebih dalam praktek jarang sekali dijumpai kasus-kasus ganti rugi yang berhasil dicairkan, walaupun hakim mengabulkan tuntutan/gugatan yang diminta<sup>45</sup>. Oleh karena itu Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa perlindungan korban secara langsung ini sebagai "masih terbatas" dalam bentuk pemberian ganti rugi oleh pelaku tindak pidana, dan belum ada ketentuan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban tindak pidana. Ganti rugi oleh negara hanya terbatas pada korban sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangan Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 56-87

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Op cit*, hal. 58

Menurut Mardjono Reksodiputro, istilah pemberian ganti rugi oleh negara ini disebut dengan kompensasi. Sedangkan jika ganti rugi itu dibayar oleh pelaku, disebut restitusi. Kemungkinan pembayaran dalam bentuk kompensasi dapat dibagi dua yaitu<sup>47</sup> :

1. Bilamana negara merasa turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa, karena tidak mampu melindungi korban dari ancaman pelaku. Misalnya dalam kasus perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan. Kompensasi ini dapat diberikan dalam bentuk pengobatan secara cuma-cuma sampai korban sembuh, atau mengganti biaya pemakaman, biaya penasihat hukum, ganti rugi cacat badan dan sebagainya.
2. Bilamana memang negaralah yang bertanggung jawab atas terjadinya penderitaan korban, misalnya dalam hal kekeliruan peradilan (*judicial error*) termasuk dalam hal kesalahan penjatuhan pidana (*wrongfull imprisonment*) atau dikategorikan sebagai telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of public power*) termasuk pula kategori penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (*abuse of economic power*) yang menimbulkan kerugian karena kurang tanggapnya instansi pemerintah, misalnya kerugian karena pencemaran lingkungan, keamanan dalam pekerjaan (*labour safety*) atau kerugian konsumen. Korban individual, tetapi umumnya sudah merupakan kelompok korban. Oleh karena itu penanganannya perlu secara khusus pula.

## B. Pengertian Korban

Aliran positivis ("modern") sangat memperhatikan posisi dari orang yang dirugikan. Hanya merupakan suatu masalah untuk mengatakan siapakah sebenarnya yang merupakan orang yang dirugikan atau si korban itu?

<sup>47</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, Op cit, hal. 94-95

Tampaknya hal ini mudah dijawab, akan tetapi kalau diteliti secara mendalam dari sudut viktimologi maka sulit juga untuk menentukannya. Antara pembuat delik dan si korban ada suatu proses interaksi<sup>48</sup>.

Pada awalnya studi kepada korban dikenal dengan istilah *special victimology* yang khusus mempelajari korban kejahatan. Perkembangan selanjutnya melahirkan yang dinamakan *general victimology* yang mempelajari korban kejahatan dalam arti umum dan *new victimology* yang mengkaji korban akibat penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Secara keseluruhan viktimologi ini bertujuan untuk menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-musabab terjadinya viktimisasi dan mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia<sup>49</sup>.

Berbicara mengenai siapakah yang dimaksud dengan korban, banyak ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian "Victim" atau "korban" tindak pidana (kejahatan), antara lain :

1. Sahetapy (1986), mengatakan sebagai berikut<sup>50</sup> :  
*"a victim could be an actual person, a legal person, whom has suffered harm, damage, injury or any kind*

<sup>48</sup> Sudarto, 1983, Op cit, hal.193.

<sup>49</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan I, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hal. 175

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, 1992, Op cit, hal.9-10



*or form of loss, either physically or mentally not only from a legal viewpoint, but also from sociological, economical, political, or cultural perspective".*

2. Arif Gosita

"Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat berarti : individu, atau kelompok baik pemerintah atau swasta

<sup>51</sup>.

3. Cohen

Menitikberatkan pengertian "*Victim*" kepada "*the innocent victim*", yaitu :

*"whose pain and suffering have been neglected by the state, while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who is responsible for that pain and suffering."*<sup>52</sup>

4. Draft Text dari United Nation Declaration on The Protection and Assistance of Crime Victims (1983) memberikan batasan pengertian "*crime victim*" sebagai berikut<sup>53</sup> :

*"crime victim" is someone who suffers loss, whether from injury, deprivation of property, social disadvantage or emotional trauma as the result of an act, for which he or she was not responsible, which has been proscribed in a criminal code or penal statute.*

Ditambahkan dalam deklarasi tersebut bahwa, termasuk ke dalam pengertian "*crime victim*" adalah keluarga korban dan mereka yang menerima akibat yang sama (dengan korban) karena mencegah kejahatan, membantu korban atau membantu petugas penegak hukum.

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

Menurut Muladi korban didefinisikan sebagai : seseorang yang "menderita" kerugian sebagai akibat suatu kejadian dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan<sup>54</sup>.

Dalam Konggres ke-5 tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum" yang diselenggarakan oleh PBB pada bulan September 1975 di Jenewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan "Penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum" (illegal abuses of economic power)<sup>55</sup>. Dengan demikian pengertian korban telah diperluas tidak saja mencakup korban dari kejahatan konvensional, tetapi juga korban kejahatan non-konvensional dan penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*economic power*) serta kekuasaan umum (*public power*)<sup>56</sup>.

Richard Queinney juga memperluas pengertian korban dengan mengatakan bahwa dengan suatu realitas alternatif, kita harus merevisi atau paling tidak memperluas pandangan kita tentang viktimisasi. Dengan berpaling dari teori realitas yang mendominasi pemikiran

<sup>54</sup> Muladi, 1992, Op cit, hal. 78

<sup>55</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1991, hal. 10

<sup>56</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, Op cit, hal.87

kriminologi, kita harus mulai memahami korban dari posisi korban perang, korban sistem "koreksional", korban kekerasan negara dan korban penindasan dalam segala bentuknya<sup>57</sup>.

Sedangkan dalam perkembangan selanjutnya W.H. Nagel memperkenalkan konsep viktimisasi struktural yang menunjukkan terdapatnya proses penimbunan korban oleh struktur-struktur sosial yang ada. Dalam proses perubahan sosial dewasa ini terdapat kelompok-kelompok sosial yang menderita secara fisik, psikis maupun sosial, akibat bekerjanya struktur-struktur ketidakadilan di dalam masyarakat<sup>58</sup>.

Dalam Resolusi MU-PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "korban" adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam penjelasan bagian "*Victims of abuse of power*" dinyatakan bahwa pengertian "korban" termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum

<sup>57</sup> Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan LBHI, Jakarta, 1988, hal. 125

<sup>58</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan dalam Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 119

merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian "kerugian" (*harm*) menurut Resolusi tersebut meliputi kerugian fisik maupun mental (*physical or mental injury*) penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*), atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substantial impairment of their fundamental rights*). Istilah "korban" juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Para korban tentunya mempunyai hak-hak. Adapun yang menjadi hak-hak korban, antara lain :

1. Si korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuannya memberi kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam kejahatan, delikwensi dan penyimpangan tersebut.

2. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya)<sup>59</sup>.

Pembahasan mengenai korban ini seyogyanya harus ke arah penemuan pengertian-pengertian, pencarian dan pengumpulan bahan untuk dijadikan dasar pertimbangan menyusun undang-undang mengenai kedudukan korban serta hal lain yang bersangkutan dalam tindak pidana.

Tujuan pengkajian masalah korban harus melihat tidak saja "korban individual" tetapi juga "kelompok individu" yang menjadi korban. Jadi korban harus diartikan "individu" maupun "kelompok"<sup>60</sup>.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian "perlindungan korban" dapat dilihat dari 2 (dua) makna, yaitu :

- a. Diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang) ;
- b. Diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian

<sup>59</sup> Arif Gosita, *Kedudukan si Korban Di dalam Tindak Pidana*, Laporan Seminar Kriminologi III, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1977, hal. 147

<sup>60</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Op cit*, hal.88

orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya<sup>61</sup>.

Hak korban akan ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang kesejahteraan/jaminan sosial (*social security*), seperti terlihat misalnya dalam Artikel 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UHDR)<sup>62</sup>.

Korban kejahatan yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana, di satu sisi mengharap pelaku dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana Indonesia (KUHP) dan di sisi lain berharap adanya bentuk pertanggungjawaban secara langsung dari pelaku tindak pidana kepada dirinya. Bentuk pertanggungjawaban secara langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban ini, salah satunya dengan pemberian ganti rugi.

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.56.

<sup>62</sup> Ibid.

### C. Teori-Teori dan Tujuan Pemidanaan

Sehubungan dengan pengaturan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban, Sudarto berpendapat bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti rugi yang dikenakan kepada pelaku itu akan mempunyai arti apabila si pelaku itu mampu membayar. Apabila ia tidak mampu, dan dapat diperkirakan bahwa sebagian besar dari orang yang melakukan tindak pidana itu adalah termasuk orang yang tidak mampu. Lebih lanjut Sudarto mengingatkan di samping masalah kemampuan, perlu ditinjau pula makna dari pidana tambahan tersebut dalam rangka makna dari pidana pada umumnya<sup>63</sup>.

Tujuan yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana selama ini belum pernah dirumuskan secara formal dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan ini baru tampak dalam KUHPP Tahun 1999/2000, oleh karena itu pembahasan masalah tujuan pemidanaan ini lebih bersifat teoritis.

Tujuan pemidanaan pada umumnya adalah :<sup>64</sup>

- a. mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial ;
- b. mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terhukum ;

---

<sup>63</sup> Sudarto, 1983, Op cit, hal. 195

<sup>64</sup> Ibid, hal. 195-196

- c. mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik ;
- d. pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.

Pidana pengenaan ganti rugi itu dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pemidanaan yang mana ? Kalau ganti rugi itu dapat dibayar oleh si tertuduh, maka tujuan pemidanaan yang tersebut dalam sub c lah yang dipenuhi, atau bagi mereka yang masih berpandangan "klasik" tujuan yang disebut dalam sub d. Dalam pada itu perlu dikemukakan di sini, bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) KUHPP Tahun 1999/2000 ditegaskan bahwa "*pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia*".

Sedangkan dalam Pasal 50 ayat (1) KUHPP Tahun 1999/2000 disebutkan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Apabila terpidana tidak mampu untuk membayar kewajiban ganti rugi, namun kewajiban tersebut tetap dipaksakan, maka tujuan pemidanaan malahan tidak



tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terhukum agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya itu mungkin malahan membuat ia menjadi lebih jahat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan<sup>65</sup>.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu<sup>66</sup> :

1. Teori Absolut atau teori pembalasan ( *retributive / vergeldings theorieen* ) ;

Menurut teori absolut, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini muncul pada akhir abad XVIII, dan Immanuel Kant salah seorang dari tokoh teori ini berpendapat, " pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan mencerminkan keadilan ".

2. Teori Relatif atau teori tujuan ( *utilitarian / doeltheorieen* ).

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 196

<sup>66</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *TeoriTeori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1998, hal. 10

Menurut teori relatif tujuan pemidanaan bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk pencegahan (*prevensi*) kejahatan, baik *prevensi special* maupun *prevensi general*.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan pemidanaan secara tradisional dan teoritis ini, hanya berorientasi pada pelaku kejahatan. Dalam kaitan ini, Van der Heuvel menyatakan bahwa sekarang telah terjadi pergeseran perhatian. Pergeseran perhatian tersebut adalah bahwa hukum pidana tidak lagi semata-mata memusatkan perhatiannya terhadap pelaku dan tindak pidananya, melainkan juga memusatkan perhatian terhadap konsekuensi-konsekuensi yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana<sup>67</sup>.

Dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Tahun 1980, salah satu laporannya menyebutkan<sup>68</sup> :

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita, 1992, Op cit, hal. 55

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 82

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperlihatkan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
  - a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
  - b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
  - c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau oleh masyarakat.

#### D. Hubungan antara Ganti Rugi terhadap Korban dan Tujuan

##### Pemidanaan

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 50 ayat (1)

KKUHP Tahun 1999/2000 adalah :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pidana pengenaan ganti rugi dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pemidanaan, dimana dengan adanya pembayaran ganti rugi oleh pelaku tindak pidana kepada korban, maka salah satu tujuan pemidanaan, yaitu point c

dapat terpenuhi. Terlebih lagi dengan pidana pengenaan ganti rugi tersebut tidak akan mendatangkan penderitaan dan tidak merendahkan martabat pelaku tindak pidana. Hal tersebut juga memenuhi Pasal 50 ayat (2) KUHPP Tahun 1999/2000 yang menegaskan bahwa “*pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia*”.

Andi Mattalatta menyatakan bahwa hakekat dari suatu kejahatan harus juga dilihat sebagai sesuatu yang merugikan pihak lain, yaitu yang disebut dengan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan dari si korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya<sup>69</sup>.

Lebih lanjut diuraikan pentingnya untuk memperhatikan kepentingan korban dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan logika, tetapi juga untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Si pelaku yang telah berbuat baik kepada korbannya, akan lebih mudah pembinaannya, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkrit untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya. Penjatuhan sanksi berupa kewajiban untuk memberikan santunan

---

<sup>69</sup> Andi Mattalatta, dalam J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 42

kepada korban, akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena pelaksanaannya dibutuhkan peran aktif dari si pelaku. Peranan yang lebih aktif dari pelaku akan memudahkan dia untuk menghayati akibat dari perbuatannya, dibandingkan dengan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana biasa bersikap pasif.

Dilihat dari sudut pandang masyarakat, penjatuhan pidana tersebut memberikan kesan bahwa si pelaku bukan saja telah dijatuhi pidana, tetapi juga telah membayar hutangnya dalam bentuk perbuatan baik terhadap korban. Pandangan ini lebih memudahkan masyarakat untuk menerima kembali keberadaan pelaku itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sikap masyarakat ini pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku sebagai suatu syarat dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik<sup>70</sup>.

Pidana pengenaan kewajiban ganti rugi yang diberikan kepada terpidana akan dapat dirasakan oleh korban, apabila terpidana mampu membayar ganti rugi. Apabila ia tidak mampu maka korban belum dapat terpenuhi haknya dalam hal menerima pembayaran ganti rugi.

---

<sup>70</sup> Ibid.

Masalah ganti rugi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, menurut Romli Atmasasmita merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku<sup>71</sup>, sehingga nilai ganti rugi dalam hal ini tidak terletak pada manfaat bagi korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku kejahatan atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban<sup>72</sup>.

Berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan korban, Glugielmo Gulota menggunakan analisis perilaku psikologis, di mana ia menegaskan antara pelaku dan korban dipandang sebagai hubungan interaksi antar individu dengan individu yang bergerak dari hubungan intrapersonal ke arah hubungan transpersonal. Secara tegas Gulota menyatakan tidak mungkin perilaku korban ini dikaji secara mandiri, tetapi harus dilihat secara bulat dari aspek kejahatan dan korban.

Hubungan pelaku dan korban ternyata tidak sederhana adanya tetapi membentuk hubungan yang

---

<sup>71</sup> Romli Atmasasmita, 1992, Op cit, hal. 44-45

<sup>72</sup> Iswanto, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 38

sistematik, saling berinteraksi diantaranya dan terjadi dalam komunitas yang lebih luas, bisa dimulai dari hubungan antar individu, keluarga atau yang lebih kompleks lagi yaitu antar komponen yang ada dalam masyarakat sebagai kesatuan. Hubungan tersebut juga bisa membentuk hubungan kaukus yang lebih luas, yaitu apabila kesatuan individu yang terlibat di dalamnya tidak hanya melibatkan satu atau dua manusia, tetapi terhadap banyak pihak, yang jika hal ini terjadi tentunya akan membuat hubungan tersebut menjadi lebih rumit.

Dilihat dari segi hubungan korban dan pelaku, maka santunan terhadap korban tindak pidana mengandung arti bahwa adanya perbaikan atau "*reparation*" terhadap gangguan yang telah terjadi dalam konteks hubungan korban dan pelaku. Pada masyarakat yang sederhana perbaikan dimaksud dilakukan dalam bentuk mentaati putusan masyarakat adat setempat yang mengandung unsur-unsur religio magis. Sedangkan pada masyarakat yang telah maju perbaikan dimaksud pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk hukuman badan. Di negara-negara yang telah maju pembayaran santunan (ganti rugi) kepada korban atau keluarga korban dari suatu tindak pidana sudah diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Santunan

menurut peraturan perundangan yang berlaku di negara-negara maju dibedakan dalam arti kompensasi dan restitusi<sup>73</sup>.

Dari segi hubungan korban dan negara santunan mengandung arti bahwa negara sebagai pengayom kepentingan masyarakat secara keseluruhan memiliki kewajiban untuk seoptimal mungkin meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam konteks masalah santunan terhadap korban tindak pidana, maka negara merupakan kepanjangan tangan kepentingan pihak korban dalam menghadapi pelaku tindak pidana.

Dilihat dari hakikat tujuan keseluruhan politik kriminal maupun politik sosial, pidana jelas dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi problema-problema sosial dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan<sup>74</sup>.

Penggunaan sanksi pidana seperti yang selama ini ada, pada umumnya ditujukan kepada kepentingan yang berupa nyawa, kemerdekaan/kebebasan atau harta benda manusia. Sedangkan sanksi pidana yang dapat dirasakan langsung pengaruhnya bagi kepentingan korban belumlah banyak dijumpai. Maka timbullah pemikiran untuk mengupayakan jenis sanksi pidana yang dapat

---

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, 1992, *Op cit*, hal. 22-23

<sup>74</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Op cit*, hal. 131.



dirasakan pengaruhnya oleh korban. Salah satunya yaitu pemikiran mengenai pemberian ganti rugi sebagai salah satu jenis sanksi pidana, hal mana pemikiran tersebut disesuaikan juga dengan perkembangan delik-delik baru yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu dipikirkan alternatif pidana lain sesuai dengan hakikat permasalahannya.

Pengaturan pemberian ganti rugi yang bersifat substansial sama sekali belum diatur dalam KUHP yang sekarang berlaku. Bagaimanapun juga KUHP warisan zaman kolonial Hindia Belanda tersebut memang sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat sekarang ini.

Pasal 14 c KUHP yang mengatur mengenai ganti rugi dalam pidana bersyarat belumlah dapat dikatakan sebagai pidana ganti rugi. Hal ini dikarenakan karena memang aturan umum KUHP yang sekarang berlaku tidak mengenal jenis pidana ganti rugi. Ketentuan Pasal 14 c ayat (1) menyebutkan "Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya

harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi", penggantian kerugian baik semua atau sebagian oleh terpidana kepada korbannya belumlah dapat dikatakan sebagai bentuk sanksi pidana, namun seolah-olah hanya merupakan pengganti pidana pokok saja.

Berkaitan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief mengemukakan sekiranya sistem pidana dan pertanggungjawaban pidana seyogyanya diorientasikan pada korban, maka kebijakan untuk mengenakan pidana ganti rugi untuk delik-delik tertentu itu seyogyanya juga dapat ditarik/diangkat menjadi kebijakan umum untuk semua delik. Itulah sebabnya dalam Konsep KUHP Baru, pidana ganti rugi dijadikan kebijakan umum (dimasukkan dalam aturan umum) untuk semua delik, walaupun masih diberi status sebagai "pidana tambahan"<sup>75</sup>.

Ganti rugi merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Jadi dalam masalah ganti kerugian ini akan diperhatikan dan diperhitungkan pihak-pihak yang mengakibatkan adanya (eksistensi) ganti kerugian dan

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 62.

fenomena lain yang ada relevansinya, hubungannya dengan adanya ganti rugi tersebut<sup>76</sup>.

Dalam menghadapi perkembangan saat ini baik tuntutan adanya perhatian dari negara terhadap warga negaranya khususnya bagi korban kejahatan maupun perkembangan dari tindak pidana itu sendiri yang membawa akibat timbulnya korban yang lebih luas, maka sudah saatnya negara dengan kebijakan pidananya mengatur pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku tindak pidana/terpidana maupun pengaturan mengenai pemberian kompensasi oleh negara kepada korban.

---

<sup>76</sup> Arif Gosita, 1986, Op cit, hal. 8.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Kebijakan Perundang-undangan Tentang Pidana Pemberian Ganti Rugi Yang Menjamin Perlindungan Terhadap Korban

###### 1. Pidana Pemberian Ganti Rugi Dalam KUHP

KUHP (WvS) yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam Pasal 14 c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam "pidana bersyarat". Jadi ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, melainkan justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatarbelakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi pada pelaku tindak pidana ("*offender*"),

tidak berorientasi pada korban tindak pidana (*"victim"*)<sup>77</sup>.

Pasal 14 c KUHP mengatur adanya kemungkinan bagi hakim untuk menetapkan agar terdakwa/terpidana memberikan penggantian kerugian pada korban.

Pasal 14 c KUHP berbunyi : "Dalam perintah yang dimaksud dalam Pasal 14 a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi."

Dari isi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 c KUHP, tersirat adanya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, yaitu dalam bentuk kewajiban pelaku tindak pidana untuk mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi. Bunyi ketentuan itu pun hanya merupakan syarat

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Op Cit, hal.56-57.

husus dari pelaksanaan pidana bersyarat, selain syarat-syarat umum sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHP.

Dalam rumusan Pasal 14 c tersebut di atas tampaknya syarat penggantian kerugian oleh terdakwa/terpidana kepada korban itu sifatnya hanya sebagai syarat tambahan yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat artinya bahwa dalam penjatuhan pidana bersyarat tidak harus disertai dengan kewajiban bagi hakim untuk memerintahkan pemberian ganti rugi oleh terdakwa/terpidana kepada korban. Dengan demikian perintah pemberian ganti rugi sangat tergantung pada kebijakan dan pengertian hakim terhadap penderitaan yang dialami oleh korban. Adanya kemungkinan pemberian ganti rugi yang diatur dalam Pasal 14 c ayat (1) KUHP bukanlah dimaksudkan sebagai perlindungan kepada korban, melainkan untuk kepentingan terpidana seperti yang dikatakan oleh Roeslan Saleh, ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat, dan juga pelepasan bersyarat, semuanya ini mengandung tendensi-tendensi individualisasi dari

reaksi dan usaha-usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan dari pidana atau tindakan itu kepada diri terhukum<sup>78</sup>.

Dengan peraturan yang berorientasi pada pelaku seperti ini, dapat dikatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini masih kurang memberikan perhatian pada masalah perlindungan korban. Hal ini sebenarnya dapat dipahami karena KUHP yang berlaku sekarang ini lebih banyak memberikan perhatian pada perlindungan ketertiban masyarakat secara keseluruhan dan tidak memberikan perlindungan secara langsung/konkrit pada kepentingan perorangan.

Dengan pemberian perlindungan pada ketertiban masyarakat itulah, maka pertanggungjawaban pidana dari pelaku bukan dikarenakan pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hak seseorang secara perorangan melainkan pertanggungjawaban karena kesalahannya mengancam dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan negara.

---

<sup>78</sup> Roeslan Saleh, *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal. 19

Berkaitan dengan hal tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “in abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban<sup>79</sup>. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual itu sebenarnya terkandung juga perlindungan korban secara tidak langsung, terutama perlindungan terhadap calon-calon korban potensial.

Adanya kemungkinan ganti rugi sebagai syarat khusus dalam penerapan pidana bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14 c ayat (1) KUHP, menurut Barda Nawawi Arief pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari

---

<sup>79</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op Cit, hal. 55



atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep pemidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*), tidak dilandasi konsep pemidanaan yang berorientasi pada korban (*victim*)<sup>80</sup>.

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa ganti rugi dalam KUHP, tidak mempunyai status apapun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (yaitu sebagai pidana bersyarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi<sup>81</sup>.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak terdapat rumusan tentang apa yang menjadi tujuan dari pemidanaan dan biasanya tujuan pidana ini dibahas secara teoritis.

---

<sup>80</sup> Ibid, hal. 61

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Op cit, hal. 57

Sementara itu salah satu laporan simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 disebutkan<sup>82</sup> :

1. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku.
2. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :
  - a. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
  - b. Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
  - c. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh si terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Meskipun dalam KUHP yang sekarang berlaku tidak terdapat rumusan tujuan pemidanaan tetapi dalam perkembangan sekarang ini telah disadari bahwa tujuan pemidanaan itu sangat perlu dirumuskan secara jelas dalam KUHP masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam Konsep KUHP

---

<sup>82</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Op Cit, hal. 82.

(selanjutnya disebut KUHUP) tahun 1999/2000 telah dimasukkan tujuan pidanaana sebagaimana tersurat dalam Pasal 50 KUHUP yang berbunyi :

- (1) Pidanaana bertujuan :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ; dan
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidanaana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Meskipun dalam tujuan pidanaana sebagaimana disebutkan di atas tidak tercantum secara tegas tentang adanya perhatian pada perlindungan korban, namun demikian dalam KUHUP sebenarnya secara tersirat telah ada upaya perlindungan pada korban. Tujuan pidanaana berupa "menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat" merupakan sinyal yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberikan

perlindungan pada korban. Konflik yang timbul akibat dari suatu tindak pidana tidak akan selesai hanya dengan menjatuhkan hukuman pada terpidana tanpa memberikan suatu perasaan puas dari si korban dalam pengertian bahwa kerelaan korban untuk menerima kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana dan memberinya maaf merupakan unsur utama dari meniadakan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Kerelaan korban untuk secara sukarela memaafkan pelaku tindak pidana/terpidana akan sulit diperoleh tanpa ada prestasi yang diberikan oleh terpidana baik atas perintah/putusan hakim maupun atas inisiatif dari terpidana itu sendiri. Prestasi yang dimaksud di sini adalah prestasi berupa pemberian sesuatu kepada korban, melakukan sesuatu untuk korban atau mengajukan permohonan maaf kepada korban. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tujuan menghilangkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dalam masyarakat dengan sendirinya akan

dapat tercapai. Dengan demikian tujuan pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas tidak hanya dapat diwujudkan dengan memperhatikan kepentingan hukum adat tetapi juga untuk anggota masyarakat secara individu yang telah menjadi korban.

Harus diingat pula bahwa meskipun yang menjadi korban kejahatan adalah hanya satu orang, tetapi rasa kekeluargaan dan solidaritas kedaerahan dapat menyebabkan timbulnya suatu gejolak dalam masyarakat jika masalah korban tindak pidana tidak mendapat perhatian dan perlindungan dalam proses peradilan pidana.

## 2. Pidana Pemberian Ganti Rugi Dalam Perundang-undangan Di luar KUHP

### 2.1. Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut UU TPE) ;

Dalam pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 7 Tahun 1955 memuat tentang kemungkinan dijatuhkan pidana tambahan dan tindakan tata

tertib oleh hakim kepada terpidana. Ketentuan ini merupakan perluasan dari ketentuan yang ada dalam Pasal 10 KUHP yang hanya mengenal pidana pokok saja dan pidana tambahan. Tetapi penambahan semacam ini tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam KUHP, karena dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Hanya saja penambahan hukuman dengan tindakan-tindakan tata tertib yang demikian, merupakan perluasan dengan kewenangan di luar hukuman mengakibatkan batas-batas kewenangan dari hakim pidana menghadapi suatu *vervaging*. Jika terdapat kewenangan pada hakim untuk mengadakan suatu kombinasi hukuman dengan tindakan, maka juga batasan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan

menjadi samar-samar<sup>83</sup>. Dengan adanya penambahan ini kewenangan hakim diperluas untuk memberikan perlindungan pada korban.

Tindakan tata tertib yang dapat dijatuhkan ada yang dikategorikan sebagai aturan yang berorientasi pada korban yaitu berupa kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, atas biaya terhukum, sekedar hakim tidak menentukan lain (Pasal 8 sub d). Meskipun ketentuan ini telah memberikan landasan hukum bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata-tertib yang akan membawa kepada perlindungan korban, tetapi ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1955 masih bersifat pilihan/fakultatif bagi hakim dan dengan demikian tidak ada kewajiban bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata-tertib terhadap terdakwa. Tetapi walau bersifat fakultatif, namun

---

<sup>83</sup> Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Cet. kedua, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 170

kedudukannya lebih baik dibandingkan ganti rugi menurut Pasal 14 c KUHP di atas, karena "tindakan tata tertib" dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok<sup>84</sup>.

## 2.2. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) ;

KUHAP sering disebut peraturan yang paling maju di zamannya dalam hal melindungi korban, meskipun korban yang dimaksud terbatas hanya diarahkan pada tersangka, terdakwa atau terpidana. Dikatakan demikian karena undang-undang ini memberikan kemungkinan memperoleh ganti rugi bagi tersangka, terdakwa atau terpidana yang di dalam proses peradilan menjadi korban perlakuan penegak hukum yang tidak melaksanakan prosedur pemeriksaan yang benar.

---

<sup>84</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 57



Adapun pengaturan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan bagi korban untuk memperoleh ganti kerugian dalam perkara pidana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

a. Pasal 95

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Melihat ketentuan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut di atas, maka pihak korban dapat menempuh dua jalur yang sesuai dengan proses yang telah dilaluinya dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang menyebabkan ia ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili di sidang pengadilan. Pertama, jika terjadi korban karena salah tangkap, salah tahan atau dikenakan tindakan lain

(penggeledahan atau penyitaan yang tidak sah) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, tuntutan ganti rugi diajukan melalui sidang praperadilan. Kedua, jika perkara pidananya telah sampai pada tingkat pemeriksaan dan diputus di sidang pengadilan, maka permohonan ganti kerugian akan diberikan melalui putusan bersamaan dengan putusan perkara pidana.

b. Pasal 97 mengatur tentang perlindungan korban dalam pengertian yang lebih luas, yaitu menyangkut pengembalian nama baik, status seseorang dalam masyarakat. Perlindungan seperti dilakukan dengan memberikan rehabilitasi, terhadap korban. Seseorang yang diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang langsung dicantumkan dalam putusan pengadilan yang menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut. Jika perkara

pidananya tidak sampai diajukan ke pengadilan, rehabilitasi diajukan melalui praperadilan (Pasal 97 ayat (3)).

Korban yang berhak memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 95 dan 97 KUHAP seperti tersebut di atas bukanlah korban yang terjadi sebagai akibat suatu tindak pidana melainkan korban yang timbul akibat kelalaian aparat atau karena penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Disamping itu terdapat juga kemungkinan bagi korban dari suatu tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku yang diatur dalam KUHAP, yaitu melalui permohonan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana.

#### c. Pasal 98

Pasal 98 ayat (1) menentukan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara

pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana itu.

Ketentuan Pasal 98 ayat (1) tersebut pada intinya menyangkut ganti kerugian yang dilihat dari sudut pandang hukum perdata yang proses gugatannya digabungkan dengan perkara proses pidana. Oleh karena itu sistim pembuktian tentang adanya kerugian dan penyebab kerugian itu menggunakan sistim pembuktian perdata. Tetapi karena gugatan permohonan ganti kerugian ini digabungkan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, maka dalam hal-hal tertentu acara pemeriksaan perdata dikesampingkan karena harus mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana. Misalnya dalam upaya mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding, gugatan ganti kerugian harus

mengikuti acara pemeriksaan perkara pidana dalam penegrtian jika perkara pidana tidak diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding, maka permohonan ganti kerugian tidak boleh mengajukan pemeriksaan tingkat banding.

d. Pasal 99

Ganti rugi yang dimohonkan melalui penggabungan dengan acara pemeriksaan pidana telah diberi batasan-batasan tertentu yaitu hanya sebatas penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dari suatu tindak pidana. Pihak yang mengajukan permohonan ganti kerugian tidak dapat menuntut ganti rugi lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk memperbaiki segala kerusakan atau penderitaannya.

Penggabungan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, dimaksudkan supaya gugatan perkara ganti kerugian dapat diperiksa dan diputus pada saat yang sama dengan

pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara pidana yang menyebabkan timbulnya kerugian tersebut. Hal ini sepintas dilihat sebagai hal yang memudahkan bagi korban serta dapat meringankan beban pembuktian, karena jika terdakwa telah diputus bersalah dalam perkara pidana, maka gugatan ganti kerugian akan diterima asal saja hakim yang memeriksa perkara tersebut berwenang mengadili perkara gugatan ganti rugi serta dasar gugatannya benar yaitu yang dituntut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat dari perbuatan terdakwa/terpidana. Namun demikian jika diperhatikan secara sungguh-sungguh, penggabungan acara pemeriksaan gugatan ganti rugi dalam perkara pidana lebih banyak merugikan korban. Kerugian yang dimaksud adalah :

- a. Dalam hal besarnya jumlah ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban, telah dibatasi oleh

aturan hukum yaitu hanya sekedar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh korban.

- b. Dalam hal korban merasa tidak puas dengan putusan hakim tentang ditolaknya gugatan atau hakim merasa dirinya tidak berwenang memeriksa perkara gugatan ganti rugi, maka pemohon/korban tidak dapat mengajukan perlawanan/banding jika perkara pidananya tidak diajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding.
- c. Dalam hal pemohon/korban merasa puas atas putusan hakim yang menyangkut gugatan ganti rugi tetapi proses pemeriksaan perkara pidana berlanjut sampai ke tingkat banding, maka dengan sendirinya permohonan ganti rugi juga akan ikut diperiksa dan diputus pada tingkat banding.

Kenyataan di atas merupakan suatu bentuk kebijakan yang kurang adil sekaligus mengandung diskriminasi jika dilihat dari perspektif korban sebagai pihak yang dirugikan.

Karena jika pihak korban tidak setuju atas putusan ganti rugi yang telah diputuskan oleh pengadilan, maka korban dalam hal ini tidak mempunyai upaya hukum untuk mengadakan perlawanan atas putusan tersebut, hanya bisa pasrah. Sedangkan kepada pihak tergugat (terdakwa), oleh undang-undang justru diberikan hak dan kesempatan untuk mengajukan banding<sup>85</sup>.

Dengan demikian gabungan perkara gugatan ganti rugi tidak dimaksudkan untuk memberikan perhatian pada kerugian dan penderitaan korban melainkan semata-mata hanya untuk mempermudah cara kerja hakim dalam memeriksa suatu perkara.

Di samping adanya ganti rugi, KUHAP juga mengatur masalah kemungkinan memperoleh rehabilitasi, yaitu hak untuk mendapat pemulihan kedudukan harkat dan martabat sebagai akibat pemeriksaan perkara di semua tingkat non

---

<sup>85</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cet. ketiga, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hal. 608-609



prosedural. Di dalam kemungkinan pemberian ganti rugi ini, KUHAP memang tidak mengatur bagaimana pelaksanaannya, tetapi hanya menyebut diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah<sup>86</sup>.

Yang jelas KUHAP merupakan langkah maju di bidang perlindungan korban dibanding dengan peraturan sebelumnya karena telah menyinggung soal ganti rugi secara langsung.

### **2.3.Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PLH) ;**

Di dalam undang-undang ini terdapat pengaturan pidana yang berorientasi pada perlindungan korban. Hal ini terlihat dengan adanya ketentuan berupa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dan luar pengadilan, termasuk penegasan soal pembayaran ganti rugi secara langsung dan seketika kepada pihak korban pencemaran (Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 UU PLH).

---

<sup>86</sup> Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983. Intinya pembayaran ganti rugi oleh negara harus diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak perkara diputus, baik melalui keputusan praperadilan atau peradilan biasa.

Selain itu dapat dilihat pula dalam Pasal 47 UU PLH yang menentukan : Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. pentupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Perlindungan korban dalam ketentuan di atas, dirumuskan dengan kata-kata "perbaikan akibat dari tindak pidana". Sebenarnya "mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak" dapat juga dikatakan sebagai suatu tindakan yang berorientasi pada perlindungan korban, baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan

membawa ke arah perlindungan masyarakat (korban kolektif) yang dirugikan akibat dari suatu tindak pidana.

Dalam UU PLH tindakan tata tertib termasuk salah satu tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim bersama-sama dengan pidana lainnya terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana lingkungan. Pengaturan tersebut meskipun sifatnya fakultatif (tergantung pada pandangan hakim) tetapi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi hakim. Tanpa adanya pengaturan yang demikian, maka hakim tidak akan mungkin dapat menjatuhkan tindakan tata tertib karena terhalang oleh adanya asas legalitas dalam hukum pidana.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa UU PLH dipandang jauh lebih memperhatikan aspek perlindungan yang bersifat langsung pada korban.

#### **2.4.Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) ;**

Secara umum UU PK ini bertujuan untuk melindungi konsumen yang kerap kali menjadi korban dari kalangan pelaku usaha, khususnya yang berkaitan dengan lalu lintas perdagangan dan jual beli barang dan jasa.

Dalam UU PK diatur pula jenis sanksi pembayaran ganti rugi baik sebagai sanksi administrasi maupun sebagai pidana tambahan.

Pembayaran ganti rugi sebagai sanksi administrasi diatur dalam Pasal 60 UU PK yang menentukan bahwa sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 63 UU PK mengatur pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan, yang menentukan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU PK dapat dijatuhi hukuman berupa :

- a. Perampasan barang tertentu ;
- b. Pengumuman keputusan hakim ;
- c. Pembayaran ganti rugi ;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen ;
- e. Kewajiban penarikan barang ; atau
- f. Pencabutan ijin usaha.

Berkaitan dengan kedudukan sanksi pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan, Barda Nawawi Arief berpendapat<sup>87</sup> . kedudukan sanksi pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan dalam Pasal 63 merupakan suatu kemajuan dibandingkan dengan KUHP. Dengan adanya pidana ganti rugi menunjukkan adanya kebijakan yang berorientasi pada korban. Hal ini juga sesuai dengan Konsep KUHP, yang menempatkan pidana ganti rugi sebagai pidana tambahan. Namun UUPK sebagai aturan/delik khusus dapat menjadikan sanksi ganti rugi itu sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan yang bersifat imperatif untuk delik-delik/kondisi-kondisi tertentu.

Pembayaran ganti rugi kepada korban sebagai suatu sanksi dalam undang-undang ini harus

---

<sup>87</sup> Barda Nawawi Arief, 2001, Op Cit, hal. 174.

dipandang sebagai sanksi yang berusaha melindungi konsumen sebagai korban dari segi kerugian materiil yaitu dengan cara membayar ganti rugi. Selain itu pidana tambahan dalam undang-undang ini sebenarnya lebih banyak memberikan perlindungan kepada korban dari segi perlindungan preventif (kepada masyarakat) dan agar orang tidak menjadi korban kedua kalinya, yaitu dengan cara memerintahkan perampasan barang tertentu, penghentian kegiatan yang menyebabkan timbulnya kerugian, penarikan barang dari peredaran serta pencabutan izin usaha. Tanpa adanya perintah/pidana tambahan sebagaimana disebutkan di atas, maka masyarakat akan banyak menjadi korban dan orang yang telah menjadi korban akan menjadi korban kembali.

Setelah melihat berbagai ketentuan yang diatur melalui UU PK tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang ini memang dibuat untuk menjamin perlindungan korban (dalam hal ini konsumen) dari perbuatan yang merugikan akibat

pemakaian barang atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha.

**2.5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 ;**

Dalam UU TPK terdapat ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai aturan yang bersifat melindungi kepentingan dari korban tindak pidana.

Pasal 18 ayat (1) menentukan : Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian

keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2) menentukan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 18 ayat (3) bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU TPK dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang yang lebih banyak dan lebih lengkap mengatur tentang perlindungan korban kejahatan dari tindak pidana



korupsi. Dikatakan lebih banyak mengatur tentang kepentingan korban oleh karena pidana yang diancamkan dalam undang-undang tersebut dirumuskan secara kumulatif dan kumulatif alternatif, artinya pidana yang diancamkan itu gabungan antara pidana penjara dengan pidana denda atau salah satu dari pidana penjara atau pidana denda. Khusus untuk pidana denda, semuanya akan masuk ke kas negara dan itu berarti kembali kepada korbannya karena korban dari tindak pidana korupsi adalah negara. Demikian juga halnya dengan semua ketentuan yang ada dalam pidana tambahan dapat juga dikatakan untuk melindungi kepentingan korban (negara) dan jika terdapat orang per orang yang dirugikan dalam tindak pidana korupsi, maka perlindungannya terlihat pada perintah pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan pada korban.

UU TPK ini juga dikatakan paling lengkap oleh karena dalam hal-hal tertentu dalam undang-undang ini terdapat pedoman pemidanaan yang akan menjadi landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Melihat pertimbangan, beratnya sanksi maupun adanya bentuk pidana tambahan yang memungkinkan pembayaran uang pengganti untuk korban yang dirumuskan dalam UU TPK menunjukkan bahwa aspek perlindungan korban yang tercermin di dalamnya bersifat langsung/konkrit.

## **2.6.Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM)**

Dalam UU Pengadilan (HAM), pengaturan perlindungan korban diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35.

**Pasal 34 :**

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

**Pasal 35 :**

- (1) Setiap korban hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam kedua pasal di atas, maka korban dalam pelanggaran HAM akan memperoleh perlindungan yang menyeluruh, baik perlindungan fisik maupun perlindungan psikis, berupa jaminan keamanan serta jaminan untuk memperoleh ganti rugi baik dengan kompensasi, restitusi dan atau dengan rehabilitasi.

Kebijakan perlindungan korban yang diatur dalam UU Pengadilan HAM, merupakan suatu kemajuan yang berarti karena para korban mendapat jaminan langsung dari peraturan perundang-undangan dan sifatnya mutlak jika terbukti bahwa yang bersangkutan merupakan korban dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam arti bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia telah terbukti atas kesalahannya.

Jika dibandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Pengadilan HAM dengan peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur perlindungan korban, maka dapat dikatakan bahwa ketentuan perlindungan dalam UU Pengadilan HAM lebih lengkap dan lebih baik karena :

- a. UU Pengadilan HAM memberikan perlindungan sejak saat diketahui adanya pelanggaran HAM, yaitu dengan memberikan perlindungan keamanan dari ancaman dan teror dari pihak lain. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan lainnya perlindungan korban hanya mungkin diberikan setelah hakim memandang perlu untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa penggantian kerugian atau membayar uang pengganti atau memperbaiki kerusakan akibat dari tindak pidana.
- b. Perlindungan yang diberikan oleh UU Pengadilan HAM bersifat imperatif dalam arti bahwa perlindungan itu harus diberikan secara menyeluruh dan tidak bersifat fakultatif seperti dalam undang-undang lain.

c. Dalam UU Pengadilan HAM, penggantian kerugian tidak saja menjadi tanggung jawab pelaku melalui restitusi, tetapi negara juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi, apabila pelaku pelanggaran HAM tidak mampu membayar restitusi kepada korban, bahkan negara akan merehabilitasi para korban pelanggaran HAM

Guna mengetahui lebih lanjut hal yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi kepada korban, maka dilakukan penelitian terhadap responden. Para korban sendiri menginginkan mendapat ganti rugi atas kerugian atau penderitaan yang dialaminya akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 50 orang responden yang menjadi korban tindak pidana (narkoba=12, penipuan/penggelapan=10, penganiayaan=8, kesusilaan=6, lakalantas=8, pembunuhan=2, pencurian=4) di Pengadilan Negeri Semarang, terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1

Korban pernah mendapat ganti rugi dari  
pelaku tindak pidana (n=50)

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Korban mendapat ganti rugi	12	24,00
2.	Korban tidak/belum mendapat ganti rugi	38	76,00
	Jumlah	50	100,00

Dari pertanyaan yang diajukan kepada responden, ternyata hanya 12 (24%) responden yang menjawab pernah menerima ganti rugi dari pelaku tindak pidana untuk meringankan penderitaan yang dialaminya. Sedangkan 38 (76%) responden menyatakan belum atau tidak pernah menerima ganti rugi tersebut. Dalam pertanyaan selanjutnya terungkap bahwa korban menghendaki adanya ganti rugi, seperti terlihat dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2

Jawaban korban jika diberi ganti rugi (n=50)

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Setuju	40	80,00
2.	Tidak setuju	8	16,00
3.	Tidak tahu	2	4,00
	Jumlah	50	100,00

Terhadap responden yang tidak setuju diberi ganti rugi, alasan mereka cukup bervariasi dimana para responden juga memberikan lebih dari satu jawaban sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3  
Alasan tidak setuju diberi ganti rugi (n=8)

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Penderitaan tidak bisa diganti/dikurangi	5	62,50
2.	Pelaku tidak akan jera/insyaf	4	50,00
3.	Pelaku tidak mampu membayar	3	37,50
4.	Korban ingin pelaku dipenjara	2	25,00
5.	Putusan tetap melalui pengadilan	3	37,50
	Jumlah	17	275,50

Melihat frekuensi jawaban responden tersebut di atas, tampak bahwa jawaban bersifat relatif dan heterogen sehingga tidak ada kecenderungan untuk diperhatikan.

Selanjutnya mengenai pembahasan siapa yang seharusnya membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana, pada intinya terdapat dua pihak yang dianggap patut untuk membayar ganti rugi, yaitu

negara dan pelaku tindak pidana yang bersangkutan. Mengenai peran negara sebagai pihak yang turut bertanggung jawab membayar ganti rugi kepada korban, merupakan hal yang cukup beralasan mengingat di samping negara dianggap tidak mampu melindungi warga negaranya sehingga menjadi korban, negara juga dianggap memiliki fasilitas pelayanan umum. Fasilitas yang dimaksud adalah dana/sumber keuangan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari warganya yang menjadi korban tersebut. Maka sudah selayaknya apabila dana tersebut juga dimanfaatkan untuk memberi santunan kepada korban tindak pidana tersebut.

Pengaturan yang mengakomodir tentang santunan ganti rugi untuk korban yang diberikan oleh negara, dapat dijumpai dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya, namun tetap saja belum memenuhi harapan berbagai pihak yang menghendaki pembayaran ganti rugi oleh negara.



Pasal 95 KUHAP menyatakan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa dan terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Adapun menurut peraturan pelaksana KUHAP, yaitu Pasal 11 PP No.27 Tahun 1983 menentukan, negara melalui Departemen Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Untuk itu Departemen Keuangan telah mengeluarkan

Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 31 Desember 1983 No.983/KMK.01/1983. Dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan bahwa masalah ganti kerugian sehubungan dengan Pasal 95 KUHAP menjadi "beban" Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin.

Dengan demikian dapat dilihat landasan hukum ganti kerugian diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP; landasan pelaksanaan digariskan dalam PP No.27 Tahun 1983 dan landasan tata cara pembayaran ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983.

Menurut M. Yahya Harahap<sup>88</sup> mengenai pembayaran ganti rugi oleh negara tergantung pada manusia pelaksananya. Apalagi jika diperhatikan prosedur birokratis yang mesti ditempuh. Permintaan pembayaran dapat menimbulkan perasaan kecewa bagi pencari keadilan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pelayanan yang cepat dan sungguh-

---

<sup>88</sup> M. Yahya Harahap, 1993, Op Cit, hal.47

sungguh, agar pembayaran tidak hanya merupakan impian bagi yang berkepentingan.

Birokrasi yang berbelit-belit itu tentunya membuat penderitaan tersendiri bagi korban yang bersangkutan. Padahal untuk ukuran saat ini maksimum besarnya ganti rugi yang hanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika tidak mengakibatkan cacat dan hanya maksimum sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) jika tindakan itu mengakibatkan cacat atau mati, dapat dikatakan tidak lagi sebanding dengan tenaga dan pikiran yang mereka curahkan untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut.

Oleh karena itu tanggung jawab pemberian ganti rugi oleh negara di masa yang akan datang seharusnya dipermudah/disederhanakan, bahkan bila perlu diperluas tidak hanya terhadap ganti kerugian pra peradilan saja tetapi juga terhadap ganti rugi atas penderitaan korban akibat kejahatan yang menyimpannya.

Berdasarkan penelitian terhadap responden mengenai siapa yang harus membayar ganti rugi, sebagian besar korban menyatakan bahwa pelakulah yang paling bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4  
Pihak Yang Membayar Ganti Rugi Kepada Korban  
(n=50)

No	Yang Bertanggung Jawab	Jumlah	Prosentase
1.	Pelaku tindak pidana	38	76,00
2.	Negara	7	14,00
3.	Tidak tahu/tidak setuju	5	10,00
	Jumlah	50	100,00

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa sebanyak 38 orang (76%) responden menghendaki agar yang membayar ganti rugi kepada korban adalah pelaku tindak pidana itu sendiri. Adapun yang menjadi alasan dari korban membebankan pembayaran ganti rugi kepada pelaku dapat dilihat dari Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Alasan Membebaskan Ganti Rugi Kepada Pelaku**  
**(n=38)**

No	Alasan	Jumlah	Prosentase
1.	Pelaku berbuat, pelaku bertanggung jawab	24	63,16
2.	Pelaku yang merugikan korban	6	15,79
3.	Pelaku agar jera/insyaf	2	5,26
4.	Negara tidak perlu campur tangan	3	7,89
5.	Tidak tahu	3	7,89
	Jumlah	38	100,00

Persepsi korban yang demikian dalam memberikan alasan bahwa pembayaran ganti rugi oleh pelaku karena pelaku berbuat, maka pelaku harus bertanggung jawab menunjukkan adanya pengaruh model pertanggungjawaban terbatas (hanya kepada pelaku tindak pidana) ternyata masih sangat besar dalam aspek pemidanaan, hal ini merupakan salah satu ciri pemikiran klasik yang masih diikuti hingga saat ini.

Selanjutnya mengenai tata cara pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku dapat dilihat dalam Tabel 6 berikut ini.

**Tabel 6**  
**Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi (n=38)**

No	Jawaban	Jumlah	Prosentase
1.	Dilakukan di luar pengadilan	22	57,90
2.	Melalui putusan pengadilan	9	23,69
3.	Terseher/tidak tahu	7	18,41
	Jumlah	38	100,00

Jawaban responden di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari korban 22 orang (57,90%) menghendaki pembayaran ganti rugi dilakukan tidak melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa para korban menginginkan cara yang lebih praktis dan tidak terlalu direpotkan dengan birokrasi pengadilan, karena mereka berpendapat bahwa apabila pembayaran dilakukan melalui pengadilan, maka akan memutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi seperti ini tentunya harus segera ditindaklanjuti dengan cara para aparat penegak hukum, khususnya lembaga peradilan agar lebih kooperatif dalam membantu para korban untuk mendapatkan ganti rugi yang memang sudah menjadi haknya, dengan jalan menyederhanakan birokrasi pembayaran ganti rugi.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa korban tindak pidana menghendaki perhatian dari pelaku tindak pidana dalam wujud pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korbannya. Pengaturan tentang ganti rugi ini harus jelas dasar hukumnya, sehingga mempermudah korban dalam memperolehnya. Selanjutnya guna lebih menjamin kepastian mengenai ganti rugi yang layak diterimanya, korban menghendaki agar putusan mengenai pembayaran ganti rugi tersebut berhubungan langsung dengan putusan pidananya dan tidak perlu menempuh upaya hukum lain.

Keinginan para korban yang dapat dilihat dari hasil penelitian di atas, merupakan suatu hal yang patut mendapat perhatian dalam menentukan kebijakan legislatif hukum pidana untuk masa yang akan datang, sehingga tidak akan terjadi suatu "kekosongan hukum" sebagaimana yang diungkapkan oleh Paul Scholten, sebagai akibat dari dijalankannya hukum dengan sistem tertutup yang

ingin menjaga kemurnian hukum tersebut. Menurut Paul Scholten<sup>89</sup>, sistem tertutup dari hukum ini harus ditinggalkan, dalam arti hukum harus menganut sistem terbuka. Hukum harus melihat pada sistem perundang-undangan yang ada, tetapi juga harus memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Jika sistem terbuka ini dipakai, maka wewenang hakim untuk melakukan interpretasi tidak menjadi masalah lagi, dan kekosongan hukum tidak akan terjadi.

## **B. Prospek Kebijakan Perundang-undangan tentang Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Perlindungan terhadap Korban**

### **1. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Di Beberapa Negara**

Pada umumnya negara melihat persoalan perlindungan korban dari aspek seberapa jauh negara itu mengatur cara pemberian ganti rugi

---

<sup>89</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal.136-137



terhadap korban, baik melalui mekanisme peradilan pidana atau pun di luar itu. Beberapa negara telah mengatur perlindungan korban dalam hukum pidananya meskipun perhatian pada kepentingan korban itu masih terbatas pada pemberian ganti rugi baik oleh pelaku tindak pidana maupun pemberian ganti rugi oleh negara. Berikut adalah kebijakan pemberian ganti rugi terhadap korban di beberapa negara :

#### 1. New Zealand

Negara ini dikenal memiliki reputasi yang baik di bidang pemberian santunan terhadap korban, yaitu dengan diaturnya hal tersebut dalam Undang-undang yang disebut "*Criminal Injuries Compensation Act 1963*". Dasar pemikiran pemuatan Undang-undang ini adalah adanya tanggung jawab masyarakat terhadap para korban yang mengalami penderitaan akibat kegagalan negara dalam menanggulangi kejahatan<sup>90</sup>.

---

<sup>90</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal. 64-65.

Kompensasi kepada korban ini dipertimbangkan oleh badan yang disebut "*Crime Compensation Tribunal*" yang juga bertindak sebagai komisi penyelidik. Lembaga tribunal ini untuk selanjutnya berwenang memohonkan yang diajukan pihak korban kemudian meneliti untuk mendengar pemohon itu.

Namun yang disayangkan pemberian kompensasi ini tidak berlaku untuk kerugian yang bersifat material, melainkan hanya dibatasi pada kerugian atau kerusakan yang berkaitan dengan diri korban itu sendiri, yaitu kerugian yang disebabkan karena kejahatan : perkosaan, perbuatan cabul terhadap anak di bawah 12 tahun, perbuatan tidak senonoh terhadap wanita umur 12-16 tahun atau terhadap wanita atau pria, pembunuhan atau percobaan pembunuhan penganiayaan, penganiayaan, pelanggaran hukum, mengancam untuk melanggar hukum,

ancaman terhadap anak atau terhadap pria dan wanita melakukan tindakan kekerasan, meracuni dengan sengaja, penculikan gadis atau anak.

Kompensasi yang dapat diberikan sebagai akibat kejahatan di atas yaitu berupa penggantian atas biaya atau ongkos yang dikeluarkan, kerugian keuangan serta pengganti kerugian akibat rasa sakit dan penderitaan korban.

## 2. Inggris

Di negeri ini tidak semua korban tindak kejahatan dapat menerima kompensasi. Pemberian kompensasi hanya diberikan kepada kejahatan tertentu yang dipandang pantas atau perlu mendapat pertolongan.

Pemberian kompensasi ini juga bukan karena negara mempunyai tanggung jawab untuk membayar, melainkan karena merupakan bagian dari sebuah kebijakan sosial dan mungkin perluasan dari sistem

kesejahteraan atas dasar asumsi bahwa “terhadap korban kejahatan dengan kekerasan perlu diberikan sesuatu”.

Ada dua hal yang dipakai sebagai alasan pemberian kompensasi, pertama tuntutan (permintaan) kompensasi itu harus dibuat oleh lembaga (badan) peradilan atau semacamnya, dan kedua pemohon memang pantas diberi kompensasi tersebut. Untuk kejahatan (kasus) dimana korban ikut bersalah dalam kejadian itu, tidak berhak mendapatkan kompensasi ini. Selanjutnya negara menyusun perencanaan untuk program kompensasi ini yang ditangani oleh sebuah badan yang disebut *“The Criminal Injuries Compensation Board”* di bawah kementrian dalam negeri. Badan inilah yang kemudian menentukan jumlah kerugian yang akan dibayar, tanpa ada hak digugat/dibanding. Pemberian kompensasi juga diberikan apabila kasus yang terjadi

bersifat "Personal Injury" yang diakibatkan langsung oleh :

- a. Kejahatan/tindak pidana
- b. Penangkapan atau penahanan tersangka/terdakwa
- c. Tindakan pencegahan tindak pidana
- d. Membantu polisi dalam upaya melakukan penangkapan atau penahanan tersangka/terdakwa, atau membantu polisi melakukan pencegahan kejahatan.

Untuk kasus perkosaan, kompensasi diberikan sebagai imbalan rasa sakit yang diderita oleh korban atau kurangnya perlakuan terhadap korban karena tidak diperhatikannya kasus tersebut. Tetapi ganti rugi itu tidak akan diberikan bila yang diminta adalah biaya pemeliharaan bayi hasil kejahatan seksual, atau jika ganti rugi itu diminta oleh keluarga pelaku. Selanjutnya kompensasi ini tidak akan diberikan, jika sudah ada badan lain yang memberinya.

Hanya dalam waktu 8 bulan sejak badan *The Criminal Injuries Compensation Board (CICB)* berdiri, sudah ada 2.216 permintaan kompensasi yang masuk. Dari jumlah tersebut 1.184 diantaranya diproses, dengan akumulasi ganti rugi sebesar 304.643 Poundsterling atau ±853.000 dolar sedangkan sisanya sebanyak 1.032 menunggu putusan.

Pemberian kompensasi di Inggris ini termasuk lebih baik (tinggi) dibanding New Zealand atau Skotlandia, terutama dilihat dari jumlah permintaan maupun besarnya pembayaran. Kini badan CICB sudah berusia 35 tahun (CICB didirikan pada tanggal 31 Maret 1965) dan kini sudah banyak klaim yang masuk jauh lebih besar dari angka di atas<sup>91</sup>.

### 3. Swiss

Di negeri ini pengajuan ganti rugi agak rumit dan sulit. Hal ini karena adanya 21 badan yang ikut terlibat di dalam pembuatan

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, Op cit, hal.64-65

hukum di Swiss yang dikenal dengan "*Cantonal Law*". Setidaknya ada lima jalur pengaduan yang berbeda, yaitu yang disebut : *Private Complainment, Civil Palintif, Interested Party, Informer* dan *Injured Party*. Menurut Stephent Schafer hal itu menunjukkan adanya dua jalur yang bisa ditempuh penuntut ganti rugi, yaitu jalur pidana atau perdata. Pada umumnya pemohon memakai jalur perdata/sipil ini.

Apabila korban menggunakan jalur pidana, ia harus menerima apa yang disebut "adhesive prosedure" (Adhasionprozess) yaitu kemungkinan diterima atau ditolaknya permintaan yang diajukan, sehingga hal ini membatasi keberhasilan yang diminta.

Dua kemungkinan yang bisa didapat korban yang mengajukan tuntutan, yaitu :

1. Untuk korban tindak pidana yang pelakunya tidak mau memberi ganti rugi, korban dapat minta kepada pengadilan untuk

memutuskan agar pelaku membayarnya. Atau pengadilan bisa memerintah pelaku untuk berjanji membayarnya melalui memberi barang, atau memberi hasil penjualan barang tertentu, atau berbuat sesuatu untuk negara.

2. Untuk kasus tindak pidana pada seseorang yang serius, sementara kompensasinya tidak ada kelanjutannya, ada kemungkinan akan memperoleh kompensasi yang disebut "Busse" yaitu pembayaran dari orang tertentu.

Yang jelas bagi terpidana yang bersedia memberikan ganti rugi atas tindak pidana yang dilakukan, hal itu bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hukuman yang dijalani<sup>92</sup>.

#### 4. Portugal

Pasal 59 Penal Code Portugal menyatakan : hakim hanya dapat menerapkan sanksi teguran (*reprimand/warning*) dalam

---

<sup>92</sup> Stephen Schafer, *The Victim and His Criminal*, Random House, New York, 1968, hal. 116-117



istilah Portugal disebut "*admoestacao*" apabila :

1. Terdakwa bersalah melakukan delik yang tidak diancam pidana lebih berat dari 3 bulan penjara, denda sebesar 90 denda harian, atau gabungan/kombinasi kedua pidana itu.
2. Terdakwa harus telah membayar kerugian yang ditimbulkan.

Disamping hal tersebut di atas dalam KUHP Portugal tahun 1983 juga dimasukkan ketentuan yang membolehkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap delik<sup>93</sup> :

- a. Yang diancam dengan pidana maksimum 6 bulan penjara; dan
- b. Yang diancam dengan pidana gabungan (kumulasi) antara penjara dan denda yang tidak melebihi 180 denda harian.

Syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana itu adalah :

---

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 72-73

- Ada kesalahan minimal;
- Kerugian telah dibayar;
- Tidak ada faktor-faktor (untuk merehabilitasi atau pencegahan umum) yang menghalangi penyelesaian masalah dengan cara ini<sup>94</sup>.

Beberapa hal yang menarik dari Penal Code Portugal dan yang agak berbeda dengan KUHP negara lain adalah :

- a. Yang menyangkut syarat khusus yang dapat ditetapkan oleh hakim dalam hal akan menjatuhkan pidana bersyarat/pidana tertunda (*suspended sentence*) adalah adanya kewajiban terpidana untuk melakukan perbaikan moral kepada korban. Di samping itu pelaku tindak pidana harus membayar kompensasi kepada korban atau memberi jaminan untuk itu serta membayar sejumlah uang kepada bendahara negara sebesar jumlah denda maksimum yang diancamkan dalam delik tersebut.

---

<sup>94</sup>Ibid, hal. 73

b. Pasal 129 Penal Code Portugal

menentukan : hakim dapat menghadiahkan semua atau sebagian denda itu kepada pihak yang dirugikan (korban) apabila ia menderita kerugian finansial yang sangat serius dan terdakwa tidak dapat membayar kembali. Kemudian atas permintaan pihak yang dirugikan, barang-barang yang disita atau hasil kejahatan dan juga keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat diberikan/dihadiahkan kepadanya.

Dengan adanya pengaturan yang demikian dapat dikatakan bahwa Penal Code Portugal telah memberikan perhatian yang besar terhadap korban di samping memperhatikan kerugian material dan moril tetapi juga sekaligus telah membuka kesempatan yang lebih luas kepada korban untuk memperoleh perlindungan terutama penggantian kerugian dengan cara meminta kepada hakim untuk memutuskan sebagian

atau seluruh uang denda dari pidana yang dijatuhkan diserahkan kepada korban serta meminta agar benda yang berkaitan dengan kejahatan serta keuntungannya yang telah disita dapat diberikan kepada korban.

Melihat ketentuan seperti yang dikemukakan di atas sebenarnya Penal Code Portugal membebankan penggantian kerugian dan perintah perbaikan moral kepada terdakwa/terpidana. Namun demikian dapat dikatakan bahwa negara juga ikut membayar ganti kerugian kepada korban. Dikatakan demikian karena uang denda sebagai pidana seharusnya masuk ke kas bendahara negara demikian juga dengan uang hasil lelang dari barang-barang sitaan seharusnya dimasukkan ke kas bendahara negara. Tetapi karena adanya ketentuan yang membolehkan hakim untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak yang dirugikan, maka negara

menjadi tidak dapat memperoleh uang denda dan uang hasil lelang barang sitaan.

#### 5. Yugoslavia

Dalam KUHP Yugoslavia juga tidak memuat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan korban sebagai salah satu jenis pidana. Hanya saja dalam KUHP Yugoslavia memuat satu jenis pidana yaitu Teguran/Peringatan (Judicial Admonition).

Dalam KUHP Yugoslavia terdapat pasal yang memberi kemungkinan pada hakim untuk dapat memberikan perlindungan pada korban khususnya yang memberi kemungkinan untuk memberi ganti kerugian pada korban. Hal tersebut diatur dalam Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 B.

Pasal 48 ayat (1) KUHP Yugoslavia menentukan pelaksanaan pidana penjara atau denda dapat ditunda dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun apabila selama waktu itu

terpidana tidak melakukan lagi tindak pidana baru.

Pasal 48 ayat (2) menentukan syarat-syarat lain yang dapat ditetapkan oleh pengadilan untuk penundaan pidana itu ialah :

1. Pemberian ganti rugi (restitusi) oleh terpidana atas keuntungan materiil yang diperolehnya dari tindak pidana.
2. Pembayaran ganti kerugian (kompensasi) atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
3. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh pengadilan.

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Yugoslavia mengenai kemungkinan diberikannya ganti rugi kepada korban pada prinsipnya sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 C ayat (1) KUHP Indonesia, dimana pemberian ganti rugi tergantung pada pandangan hakim untuk

menjatuhkan/menetapkan perlu tidaknya pemberian ganti rugi kepada korban.

Kemungkinan lain untuk memberikan ganti rugi kepada korban menurut KUHP Yugoslavia diatur dalam Pasal 50 B yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan teguran judicial. Untuk lebih jelasnya Pasal 50 B menyebutkan<sup>95</sup> :

1. Untuk delik-delik yang diancam pidana penjara maksimum sampai 1 tahun atau diancam pidana denda, apabila dilakukan dalam keadaan-keadaan yang meringankan sehingga membuat delik itu menjadi ringan.
2. Untuk delik-delik yang diancam dengan pidana penjara lebih berat dari 1 tahun apabila persyaratan undang-undang untuk menjatuhkan tindakan ini telah terpenuhi.
3. Berdasarkan syarat-syarat pada ayat (1) teguran judicial ini juga dapat dijatuhkan untuk perbarengan tindak pidana.
4. Dalam menetapkan apakah peringatan judicial dijatuhkan, pengadilan akan mempertimbangkan :
  - riwayat hidup si pelaku apakah pernah dipidana sebelumnya pernah dikenakan peringatan judicial, motif-motif dalam melakukan tindak pidana, kesiapan si pelanggar memberikan kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkannya dan keadaan-keadaan lain yang berhubungan dengan pribadinya.

---

<sup>95</sup> Ibid, hal. 97

Dari perbandingan KUHP beberapa negara dengan KUHP Indonesia yang berlaku saat ini dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia pada dasarnya sama dengan KUHP Yugoslavia. Perbedaannya menyangkut pada perlindungan korban khususnya yang mengatur tentang ganti rugi adalah adanya ketentuan sanksi teguran/peringatan judicial dalam KUHP Yugoslavia, dimana salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan teguran/peringatan judicial adalah kesediaan untuk membayar ganti rugi kepada korban, hal semacam inilah yang tidak terdapat dalam KUHP Indonesia. Baik dalam KUHP Indonesia maupun KUHP Yugoslavia tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kemungkinan negara memberikan kompensasi kepada korban, kecuali dalam ketentuan KUHP Indonesia dilakukan melalui proses pemeriksaan praperadilan dimana dimungkinkan negara membayar ganti kerugian kepada tersangka/terdakwa yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tidak sesuai dengan aturan



hukum atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan hukum yang diterapkan.

## **2. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KKUHP)**

Adanya perhatian terhadap kepentingan korban dalam KKUHP terlihat dalam rumusan Pasal 62 yang menentukan bahwa salah satu jenis pidana tambahan adalah pembayaran ganti kerugian; di samping adanya pidana pemenuhan kewajiban adat yang dapat pula dikatakan sebagai upaya perlindungan terhadap korban (secara kolektif). Selain itu dalam pedoman penjatuhan pidana ditentukan agar hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan antara lain, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya (Pasal 51 ayat (1) sub I, serta dalam Pasal 66 ditentukan bahwa pidana penjara dapat tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan, di mana salah satu keadaan tersebut

adalah terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban.

Meskipun dalam KUHPP tahun 1999/2000 telah dicoba untuk memberikan perhatian pada korban dengan cara memberikan kemungkinan untuk memberikan ganti rugi, namun dalam kebijakan formulasi masih tetap terlihat lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana. Dikatakan demikian karena tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHPP pada prinsipnya diarahkan pada kepentingan pelaku. Walaupun tujuan pemidanaan dalam KUHPP masih tertuang tujuan melindungi kepentingan korban individual melainkan kepentingan korban kolektif dan perlindungan korban secara abstrak.

Penjelasan Pasal 50 KUHPP juga menunjukkan bahwa KUHPP masih lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana dibanding kepada korban. Penjelasan Pasal 50 KUHPP menyatakan "Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan, peranan

hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam pasal ini dikemukakan tujuan dari pembedaan, yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat; serta aspek psikologis untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan."

Namun di lain sisi, memang patut diakui bahwa dengan dicantumkannya ganti rugi sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Buku I Konsep KUHP dan dengan sendirinya juga berlaku umum untuk semua delik, baik yang diatur dalam Konsep KUHP maupun untuk delik-delik di luar Konsep KUHP. Tetapi khusus untuk delik-delik yang dijumpai dalam KUHUP, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan untuk semua delik karena telah dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (2) KUHUP yang menyatakan "Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dijatuhkan

jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.” Ketentuan ini jelas membatasi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan khususnya ganti rugi pada semua delik, karena hanya delik tertentu saja yang dapat dijatuhi pidana tambahan, yaitu di dalam rumusan delik tersebut secara tegas diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tambahan. Pembatasan ini juga berlaku untuk delik-delik di luar Konsep KUHP, karena Pasal 62 ini berada dalam Bab III Buku I, yang oleh Pasal 192 dinyatakan berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain.

Dengan adanya ketentuan Pasal 62 ayat (2) tersebut, maka hanya delik-delik tertentu saja yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, karena dalam rumusan delik telah secara tegas dicantumkan pidana tambahan apa yang dapat dijatuhkan oleh hakim jika hendak menjatuhkan pidana tambahan.

Delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi adalah yang terdapat dalam :

1. Bab XIV tentang tindak pidana terhadap asal usul perkawinan ;
2. Bab XXIV tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman ;
3. Bab XXVII tentang tindak pidana merugikan kreditur dan orang yang berutang ;
4. Bab XXIX tentang kejahatan jabatan.

Selain ketentuan tersebut tidak dijumpai lagi delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban, tetapi untuk jenis pidana tambahan lainnya masih dimungkinkan karena dalam rumusan delik diperbolehkan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang-barang tertentu.

Menilik dari kedudukan pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi yang dapat dijatuhkan oleh hakim, maka dapat dikatakan

bahwa KUHPP hanya akan memberikan kemungkinan pembayaran ganti rugi kepada korban yang mengalami kerugian materi yang secara langsung disebabkan karena tindak pidana. Konsep KUHPP tidak memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terhadap badan, misalnya dalam hal penculikan dan penyanderaan, ada kerugian yang dialami seseorang karena tidak dapat mencari nafkah; dalam tindak pidana penganiayaan ada kerugian karena harus mengeluarkan biaya pengobatan dan juga kehilangan penghasilan karena tidak dapat melaksanakan pekerjaan karena dianiaya.

Dengan adanya pembatasan seperti menurut rumusan Pasal 62 ayat (2) KUHPP, maka dapat dikatakan ada diskriminasi terhadap siapa yang berhak untuk mendapat ganti rugi akibat dari suatu tindak pidana dan siapa yang tidak akan mendapat ganti rugi. Korban penganiayaan yang menderita secara fisik atau korban

percobaan pembunuhan atau korban penculikan atau penyanderaan yang mengakibatkan mereka tidak dapat mencari nafkah sebagai akibat suatu tindak pidana adalah contoh para korban yang tidak mendapat kesempatan untuk memperoleh ganti rugi. Hal ini dikarenakan dalam rumusan delik-delik kejahatan terhadap tubuh tidak tercantum ketentuan yang memperbolehkan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberian ganti rugi pada korban. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkembangan kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini seperti merebaknya kejahatan kekerasan (penganiayaan) dan kejahatan dengan menggunakan kekerasan seperti perampokan disertai pembunuhan, pencurian disertai kekerasan dan ini berarti korban kejahatan makin bertambah, maka apabila KUHPP tetap menggunakan pola perumusan pidana tambahan seperti yang ada sekarang, maka korban kejahatan seperti tersebut di atas

tetap tidak akan mendapat perhatian dan perlindungan dari hukum pidana.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi seorang melakukan tindak pidana berupa kealpaan/kelalaian yang menimbulkan kerugian, memberikan ganti rugi pada korbannya. Hal tersebut menurut KUHPP diangkat sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa (Pasal 66 sub d) dan sebagai salah satu alasan yang dapat meringankan pidana (Pasal 124 sub e). Ketentuan seperti ini bukanlah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana pemberian ganti rugi, melainkan agar hakim mempertimbangkan perbuatan baik yang telah dilakukan oleh terdakwa untuk korbannya bilamana akan menjatuhkan putusan pidana. Dengan demikian ganti rugi semacam ini bukanlah diorientasikan pada kepentingan korban, namun diorientasikan untuk kepentingan pelaku.



### 3. Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Kebijakan Hukum Pidana Yang Akan Datang

Berbicara mengenai sanksi ganti kerugian sebagai perlindungan korban tindak pidana di dalam hukum pidana mendatang, berarti melakukan kajian terhadap kebijakan yang sama sekali belum pernah dilakukan, dan hal ini masih merupakan “ius constituendum”. Kajian terhadap masalah perlindungan korban sebagai bagian dari kebijakan kritis dan alternatif yang memang seyogyanya dilakukan, karena menurut Barda Nawawi Arief, hal ini merupakan suatu keharusan agar hukum tidak lagi statis-dogmatis, dalam arti hanya berorientasi pada hukum pidana positif semata, hal ini merupakan ciri dari pola pikir lama yang dipandang dapat menghambat pengembangan pembaharuan hukum pidana itu sendiri<sup>96</sup>.

<sup>96</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato pengukuhan Guru Besar, Semarang, 1994, hal. 10.

Periksa Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 104-105. Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan “...sepanjang hukum pidana Indonesia belum mantap, bahkan masih merupakan “Ius constituendum” yang sedang dikaji dan dikembangkan, maka Ilmu Hukum Pidana (IHP) yang diajarkan seyogyanya tidak terlalu statis dan rutin. Tetapi juga harus dikembangkan kajian kritis dan alternatif”.

Untuk melakukan kajian yang bersifat prospektif, akan dilakukan terlebih dahulu evaluasi terhadap kondisi objektif persoalan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang (hukum positif). Dari analisis terhadap persoalan yang bersifat "Ius Constituendum" tersebut menghasilkan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan legislatif hukum pidana sebagai bagian dari hukum positif yang ada, sebenarnya telah memperhatikan aspek perlindungan korban. Masalahnya adalah kebijakan tersebut pada umumnya masih bersifat tidak langsung (abstrak), meskipun beberapa kebijakan legislatif diantaranya telah memberikan perlindungan secara langsung, yaitu dalam bentuk ganti rugi kepada korban yang bersangkutan.
2. Walaupun masalah ganti rugi ini sudah mendapat perhatian pembuat Undang-undang, tetapi hal ini masih menjadi persoalan besar. Masalahnya adalah tidak/belum adanya

ketentuan yang jelas tentang mekanisme pembyaran ganti rugi itu sehingga hal ini menyulitkan bagi pihak korban, bahkan dapat dipandang sebagai “menambah penderitaan baru” bagi korban yang bersangkutan.

3. Paradigma baru melihat bahwa tindak pidana (kejahatan) tidak hanya penjelmaan konflik yang terjadi antara individu dengan negara, tetapi juga merupakan konflik interpersonal antar individu (pelaku-korban), karena itu penanggulangannya juga harus memperhatikan dua pilar ini, termasuk dalam rangka memberikan perhatian terhadap korban tindak pidana.
4. Terhadap persoalan yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi terhadap korban, sebenarnya memang telah ada solusi untuk menyelesaikannya menurut KUHAP, yaitu melalui Pasal 98 sebagai berikut :

Ayat 1 : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk

menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu;

Ayat2 : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Namun demikian pada kenyataannya jarang sekali hal ini dimanfaatkan oleh pihak korban. Apalagi jika pihak penegak hukum sendiri masih melihat bahwa upaya untuk melakukan hal itu bukanlah menjadi bagian dari tanggung jawabnya, melainkan menjadi urusan pihak korban sendiri. Karena itu persepsi penegak hukum yang demikian harus diubah, sehingga penegak hukum harus melihat bahwa di dalam proses peradilan pidana itu korban tidak hanya sekedar sebagai saksi yang secara pasif akan diminta keterangannya mengenai apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, melainkan harus dilihat pula bahwa ia (korban) adalah mereka atau pihak yang menderita dan banyak dirugikan oleh

pelaku karena kejahatan yang menyimpannya<sup>97</sup>. Oleh karena itu penegak hukum mempunyai kewajiban moral untuk mengupayakan agar kerugian moral atau materiil yang dialaminya itu bisa dipulihkan, sekaligus bersamaan dengan proses peradilan atas kejahatan tersebut<sup>98</sup>. Jika hal ini bisa dilaksanakan diharapkan akan mulai ada kasus-kasus tindak pidana yang di dalam pemeriksaan terintegrasi sekaligus dengan tuntutan ganti rugi perdata sebagaimana yang diamanatkan KUHAP.

Permasalahan selanjutnya adalah berkaitan dengan masih terbelenggunya kewenangan hakim untuk memutus perkara yang mengandung unsur gabungan perkara ini, karena hal ini dipandang tidak lazim dilakukan. Di samping itu jenis pidana yang dirumuskan Undang-Undang pada umumnya menganut sistem tunggal (absolut-imperatif) sehingga hal tersebut tidak memberi kelonggaran

<sup>97</sup> Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban* dalam J.E. Sahettapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 43-44.

<sup>98</sup> Dengan adanya upaya penggabungan perkara, tentunya dapat dihindari, cara melakukan tuntutan ganti rugi melalui gugatan perdata yang biasanya berbelit-belit, memerlukan waktu lama (karena kemungkinan upaya banding, kasasi, atau bahkan peninjauan kembali. Itupun belum tentu dijamin keberhasilannya karena tidak ada lagi dukungan penegak hukum yang menangani perkara yang bersangkutan. Karena itu kepentingan korban harus mendapat prioritas pula bagi penyidik dan penuntut umum.

yang dianggap paling tepat atau paling efektif bagi terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem ancaman tunggal, membuat hakim mau tidak mau terpaksa menjatuhkan pidana penjara, walaupun menurut hakim sebenarnya lebih baik atau lebih tepat apabila dijatuhkan jenis pidana yang lain, dilihat dari tujuan pemidanaan. Karena itu penjatuhan pidana yang demikian jelas bukan atas pertimbangan yang rasional dan berorientasi pada pelaku (termasuk korban), tetapi hanya karena keterikatan dan "hormat"nya kepada Undang-Undang<sup>99</sup>.

Oleh karena itu patut dipertimbangkan gagasan dari Barda Nawawi Arief<sup>100</sup>, agar kepada hakim diberi pedoman atau kriteria penjatuhan pidana penjara. Masalah pedoman ini dipandang sangat penting, apabila dilihat dari pendirian atau kebijakan untuk membatasi penggunaan pidana penjara hanya pada orang-orang tertentu dan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Pedoman penjatuhan pidana penjara ini

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1996, hal. 154-155

<sup>100</sup> Ibid, hal. 143

dimaksudkan untuk memberikan dasar rasionalitas atau untuk memberikan motivasi, mengapa hakim menjatuhkan pidana penjara. Dengan pedoman ini diharapkan ada pegangan bagi hakim dalam hal-hal apa saja ia menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana penjara.

Konsep KUHP telah mengakomodasi pedoman pemidanaan ini dalam Pasal 54 KUHPP (Bab III tentang Pemidanaan, Pidana dan Tindakan).

Masalah perlunya pedoman pemidanaan dalam hal penjatuhan pidana penjara inipun tampaknya mendapat perhatian dari I.J. Cy Shain seorang Direktur Penelitian dari *Judicial Council of California*. Ia berpendapat bahwa terdakwa yang memenuhi syarat-syarat tertentu sebaiknya tidak dijatuhi pidana penjara. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

1. Terdakwa selain tidak termasuk penjahat "profesional" juga tidak mempunyai banyak riwayat kriminalitas ;
2. Dalam melakukan tindak pidana banyak faktor-faktor yang meringankan ;
3. Terdakwa tidak melakukan ancaman maupun menyebabkan penderitaan atau kerugian yang serius pada korban (korban-korban)-nya ;

4. Fakta-fakta menunjukkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana oleh karena ada provokasi dari pihak korban;
5. Terdakwa bersedia untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materi maupun luka-luka yang diderita korban;
6. Tidak terdapat cukup alasan yang menunjukkan bahwa terdakwa akan melakukan lagi tindak pidana atau tidak terdapat cukup petunjuk bahwa sifat-sifat jahat terdakwa akan muncul lagi<sup>101</sup>.

Bertitik tolak dari pendapat I.J. Cy Shain di atas, masalah ganti rugi sebagai upaya perlindungan pada korban tampaknya sudah menjadi salah satu bagian penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Jadi dengan kata lain I.J. Cy Shain telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peran korban dalam masalah pembedanaan.

Hal penting yang patut untuk diperjuangkan sehubungan dengan pembahasan Konsep KUHP yang hingga saat ini masih berlangsung adalah penyempurnaan konsep tentang pedoman pembedanaan yang memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana ganti rugi sebagai

---

<sup>101</sup> Barda Nawawi Arief, 1996, Op cit, hal.149



upaya perlindungan terhadap korban, meskipun hal itu tidak dicantumkan secara tegas dalam perumusan tindak pidana. Adapun penyempurnaan pembahasan Konsep KUHP perlu dilakukan berdasarkan kajian pemikiran sebagai berikut :

1. Guna lebih memberikan perlindungan terhadap korban, maka kedudukan "pidana ganti kerugian" dalam sistem hukum pidana dapat dicantumkan sebagai pidana pokok atau sebagai pidana tambahan. Hal ini dilakukan dengan meninjau kembali rumusan Pasal 60 KUHPP dan Pasal 62 KUHPP.

Dalam Konsep KUHP tahun 1999/2000, pidana ganti kerugian tidak secara tegas dirumuskan dalam pidana pokok seperti yang dapat dilihat dalam Pasal 60 KUHPP 1999/2000 yang menyatakan :

- (1) Pidana pokok terdiri atas : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial.

- (2) Urutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Alternatif pertama, pidana ganti kerugian dicantumkan secara tegas dalam rumusan Pasal 60 KUHPP sebagai pidana pokok. Ganti kerugian sebagai pidana pokok berarti dapat dijatuhkan oleh hakim tanpa syarat pidana lain, seperti halnya dengan penerapan pidana pokok yang lain, maka keberadaannya merupakan pidana yang mandiri.

Mengacu pada keberadaan asas legalitas dalam sistem hukum pidana Indonesia, maka suatu jenis pidana pokok dapat dipilih oleh hakim apabila telah ditentukan lebih dahulu dalam undang-undang yang bersangkutan (KUHP). Perumusan Pasal 10 sub a KUHP yang saat ini berlaku dan juga Pasal 60 KUHPP keduanya sama sekali tidak mencantumkan pidana ganti kerugian sebagai salah satu jenis pidana pokok. Akibatnya secara yuridis normatif hakim tidak dapat

menjatuhkan/memilih jenis pidana ini dalam penjatuhan putusan.

Apabila dibandingkan baik jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 sub a KUHP maupun yang terdapat dalam rumusan Pasal 60 KUHUP, maka semuanya berorientasi pada pelaku dan aspek masyarakat (negara), tidak satupun dari jenis pidana pokok tersebut berorientasi langsung pada kepentingan korban. Meskipun patut diakui pula, bahwa pengertian perlindungan terhadap kepentingan masyarakat itu tercakup pula di dalamnya perlindungan kepentingan korban, namun tetap saja merupakan perlindungan kepentingan terhadap korban secara tidak langsung. Oleh karena itu agar terdapat keseimbangan perhatian antara pelaku dan korban, seyogyanya ganti kerugian juga harus secara tegas dicantumkan sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Alternatif kedua pidana ganti kerugian dicantumkan sebagai pidana tambahan dengan

mencantumkan secara tegas dalam rumusan Pasal 62 KUHAP. Apabila ditinjau rumusan Pasal 62 ayat (2) KUHAP membatasi kebebasan bagi hakim untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa ganti rugi bagi korban. Maka seyogyanya masalah ganti rugi ditambahkan dalam rumusan Pasal 62 ayat (3) KUHAP dengan redaksi : "Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi atau pembayaran ganti rugi kepada korban (cetak tebal merupakan tambahan redaksi dari Penulis) dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana". Dengan adanya perumusan di atas maka hakim tetap dapat menjatuhkan pidana pembayaran ganti rugi kepada korban meskipun tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana.

2. Pembayaran ganti rugi dirumuskan dalam tindak pidana secara alternatif kumulatif dengan pidana pokok. Rumusan ini berlaku untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian pada korban, baik

kerugian berupa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan maupun kerugian akibat tidak dapat menjalankan pekerjaan dalam mencari nafkah. Dengan rumusan ini maka hakim dapat mempertimbangkan pemberian ganti rugi pada korban dengan atau tanpa pidana pokok lainnya, sepanjang menurut pengetahuan hakim dalam kenyataannya pelaku tindak pidana termasuk golongan orang yang mampu memberikan ganti rugi kepada korbannya.

Proses pidana saat ini dapat dikatakan tidak memberikan tempat bagi korban untuk mendapatkan hak-haknya, maka untuk masa yang akan datang perlu dikembangkan suatu kebijakan yang memberikan kemungkinan kepada korban untuk memperoleh perlindungan yang wajar dalam proses peradilan pidana. Sehubungan dengan hal ini, Mardjono Reksodiputro mengatakan<sup>102</sup> "pertama-tama harus diciptakan suatu iklim di mana korban mau melaporkan nasibnya dan bebas dari

---

<sup>102</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, Op Cit, hal. 92

kemungkinan tekanan-tekanan ataupun ketakutan untuk melapor.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa hak-hak dan kepentingan korban patut mendapat perhatian yang besar, oleh karenanya dalam kebijakan hukum pidana (KUHP) Indonesia yang akan datang, sudah sewajarnya apabila hak-hak korban khususnya yang menyangkut pembayaran ganti rugi betul-betul mendapat perhatian agar tercipta keadilan dalam masyarakat. Perhatian terhadap korban tersebut tentunya juga tetap mempertimbangkan aspek keseimbangan antara korban dan pelaku tindak pidana, sehingga di satu sisi pemenuhan hak-hak korban terpenuhi dan di sisi lain perhatian dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana juga tidak terabaikan serta perlindungan terhadap masyarakat tetap terpenuhi.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan tulisan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik berbagai kesimpulan sebagai berikut :

1. a. Pengaturan ganti rugi yang terdapat dalam KUHP khususnya yang diatur dalam Pasal 14 sub c KUHP sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada korban, melainkan hanya agar terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat/pidana percobaan tidak menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana dalam KUHP hanyalah perlindungan yang bersifat abstrak, yaitu perlindungan umum kepada masyarakat (korban potensial).
- b. Perhatian lain terhadap korban juga dapat dijumpai dalam peraturan di luar KUHP, antara lain dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, di mana di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) UUTPE sudah dimaksudkan adanya orientasi terhadap korban, namun masih bersifat

fakultatif karena di samping terpidana dijatuhi pidana pokok dapat juga dijatuhi pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Kemudian juga dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hal mana dalam Pasal 34 sub c UU No.3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 memberikan peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jenis sanksi inipun juga bersifat fakultatif. Dalam Pasal 47 sub c, d dan e Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup juga merupakan tindakan tata tertib, sehingga jenis sanksi tersebut juga bersifat fakultatif. Kemudian dalam Pasal 63 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kedudukan sanksi pembayaran ganti kerugian sebagai pidana tambahan, maka sifatnya fakultatif. UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan (HAM), pengaturan perlindungan korban diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35, di mana perlindungan itu harus diberikan secara menyeluruh dan tidak



bersifat imperatif. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP dalam Pasal 98 sampai dengan 101, yaitu tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian pada kenyataannya juga tidak memberikan kepastian hukum bagi korban untuk memperoleh ganti rugi. Karena di samping bersifat fakultatif juga tidak memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam penerapan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Jadi pengaturan ganti rugi yang terdapat di luar KUHP, khususnya dalam perundang-undangan pidana khusus belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap korban, karena kedudukan pidana ganti rugi hanya sebagai pidana tambahan atau tindakan tata tertib yang bersifat fakultatif. Apabila hal ini dihubungkan dengan berbagai kerugian yang dialami baik korban individual maupun korban kolektif, kesemuanya menghendaki perlindungan, dan salah satu bentuknya adalah berupa pembayaran ganti rugi. Maka jaminan perlindungan bagi korban berupa sanksi ganti rugi dijadikan bagian dari pidana pokok yang dapat berdiri sendiri.

2. Pengaturan ganti rugi sebagai upaya perlindungan terhadap korban sebagai salah satu sanksi dalam

Hukum Pidana Indonesia di masa yang akan datang dapat terlihat dalam :

- a. Pasal 62 ayat (1) Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KKUHP) memasukkan ganti rugi sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan telah mengakomodasikan masalah ganti rugi sebagai penjatuhan pidana. Namun dikhawatirkan dalam prakteknya akan mengalami kendala karena ketentuan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan jika tercantum secara tegas dalam perumusan tindak pidana.
- b. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar korban tindak pidana menghendaki adanya perhatian dari pelaku tindak pidana, yaitu dengan diberikannya pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korbannya. Pengaturan ganti rugi ini harus jelas dasar hukumnya sehingga mempermudah korban dalam memperolehnya. Kerugian yang dialami oleh korban kiranya dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan legislatif hukum pidana pada masa yang akan datang.

c. Sebagai wujud upaya perlindungan terhadap korban, kedudukan ganti rugi dalam sistem hukum pidana pada masa yang akan datang dapat dicantumkan sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, di mana ganti kerugian ini dapat pula diorientasikan pada hukum tidak tertulis (hukum adat) setempat dalam rangka pembayaran kembali atau mengganti kerugian kepada korban.

## **B. Saran**

1. Agar dalam pembuatan kebijakan legislatif memuat ketentuan pidana yang secara tegas mencantumkan asas perlindungan terhadap korban. Asas perlindungan terhadap korban ini dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal nya secara jelas dan tegas pula. Kemudian perlu pula dalam perumusan ketentuan pidana dicantumkan secara tegas pidana ganti rugi di samping pidana pokok lainnya.
2. Perlunya dibuat ketentuan yang jelas tentang tata cara pembayaran ganti rugi kepada korban yang mudah dan cepat, sehingga memudahkan korban dalam mendapatkan hak-haknya. Selain itu negara dalam hal ini Pengadilan sebagai salah satu aparat penegak hukum juga ikut bertanggung jawab memberikan ganti

rugi dengan prosedur yang cepat dan mudah pula kepada korban yang memang berhak untuk menerimanya.

3. Seyogyanya dalam kebijakan hukum pidana yang akan datang, di samping adanya jaminan pemberian ganti rugi, juga memperhatikan pemberian bentuk lain, seperti rehabilitasi atau jaminan yang bersifat material lainnya. Dan para hakim diberi kebebasan untuk menentukan keputusan sesuai dengan keadilan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. 1976. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Erlangga, Jakarta. Cetakan II.
- , 1985. *Hukum Pidana Pengembangan*. Erlangga, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1996a. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1996b. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 2002. *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asmawie, M. Hanafi. 1992. *Ganti Rugi dan Rehabilitasi menurut KUHP*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1992. *Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. BPHN, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980-1981, *Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1992, *Majalah Hukum Nasional*.
- Bambang S. 1984. *Penyantunan Terhadap Korban Penganiayaan Berat*. Laporan Penelitian, Jakarta.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan, 1999-2000, *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.
- Gosita, Arif. 1977. *Kedudukan si Korban Di Dalam Tindak Pidana*, Laporan Seminar Kriminologi III, Lembaga Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- , 1986. *Viktimologi Dan KUHP Yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- , 1993. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta. Cetakan III

Harahap, M. Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini, Jakarta. Cetakan III.

Hardiwinoto, Soekotjo. 1995. *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Edisi ke-7 Cetakan ke-14.

Iswanto. 1995. *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Jaya, I.B. Surya Dharma. 1994. *Ganti Kerugian sebagai Sanksi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Kertapatrika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Kusumah, Mulyana W.. 1981. *Aneka Permasalahan dalam Lingkup Kriminologi*. Alumni, Bandung.

-----, 1988. *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*. Yayasan LBHI, Jakarta.

Lamintang, P.A.F. 1984a. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung.

-----, 1984b. *KUHAP : Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

-----, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Cetakan III.

Marpaung, Leden. 1977. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mattalatta, Andi dalam J.E. Sahetapy. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Moeljatno, 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.

Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Diponegoro, Semarang.

-----, 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.



-----, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Cetakan I.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. Cetakan II.

-----, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Prakoso, Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia, Bandung.

Prinst, Darwan. 1993. *Praperadilan dan Perkembangan Dalam Praktek*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Raharjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.

-----, 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi UI), Jakarta.

Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

-----, 1995. *Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco, Bandung. Cetakan I.

Saleh, Roeslan. 1988. *Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*.

Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 1994. *Masih Saja Tentang Kesalahan*. Jakarta.

Schafer, Stephen. 1968. *The Victim and His Criminal*. Random House, New York.

Soedarto. 1983. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. Cetakan III.

-----, 1986. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Bandung.

-----, 1994. *Hukum Pidana I*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cetakan IV.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta. Cetakan IV

-----, 1991. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif dengan Penelitian Hukum Empiris*.

Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro,  
Semarang.

Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Sudjono D. 1974. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Tarsito, Bandung.

Sugandhi, R. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.

Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Rajawali, Jakarta.

Susanto, I.S. 1991. *Kejahatan Korporasi*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemebrantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Kosumen.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan  
Hak Asasi Manusia.